

**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA JUMLAH ANGGOTA DAN  
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA  
BANK DI INDONESIA**

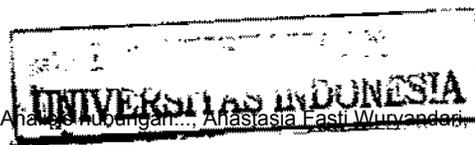
**TESIS**

**ANASTASIA FASTI WURYANDARI  
0606146974**



I  
25567

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
JAKARTA  
DESEMBER 2008**



**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA JUMLAH ANGGOTA DAN  
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS TERHADAP  
KINERJA BANK DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 2**

**ANASTASIA FASTI WURYANDARI  
0606146974**

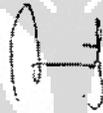


**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
JAKARTA  
DESEMBER 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anastasia Fasti Wuryandari  
NPM : 0606146974  
Tanda Tangan :



Tanggal : Desember 2008

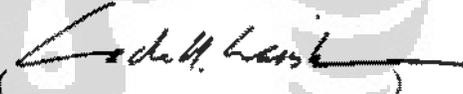
## HALAMAN PENGESAHAN

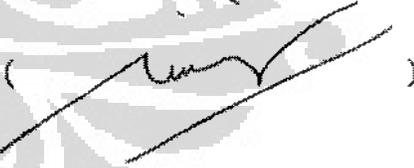
Karya Akhir ini diajukan oleh :  
Nama : **Anastasia Fasti W.**  
NPM : 0606146974  
Program Studi : **MAGISTER MANAJEMEN**  
Judul Karya Akhir : **Analisis Hubungan Antara Jumlah Anggota dan Independensi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Bank di Indonesia.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Ancella A. Hermawan, MBA** (  )

Penguji : **Dr. Gede Harja Wasistha** (  )

Penguji : **Dr. Lindawati Gani** (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Desember 2008

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi syarat kelulusan di program studi Magister Manajemen Universitas Indonesia. Segala kemampuan dicurahkan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan namun penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang dimiliki terutama waktu dan sumber daya yang ada. Oleh karenanya saran serta kritik yang membangun atas karya akhir ini sangatlah diharapkan.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di program studi Magister Manajemen Universitas Indonesia yaitu :

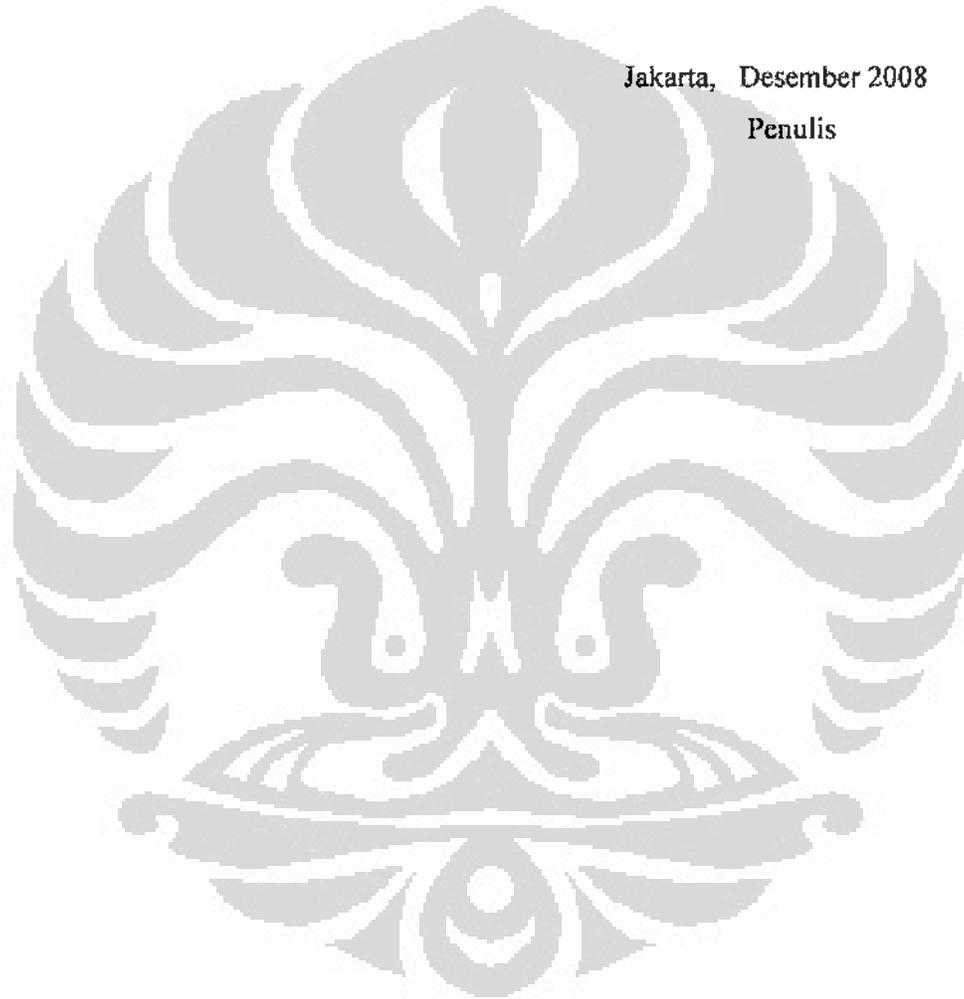
1. Bapak Rhenald Kasali, PhD selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
2. Ibu Ancella A. Hermawan selaku Pembimbing penulisan karya akhir yang banyak memberikan bimbingan, masukan dan bantuannya dalam penyelesaian karya akhir ini.
3. Pimpinan dan staff PT. Bank DBS Indonesia yang banyak memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya akhir ini.
4. Seluruh staf adpen, perpustakaan dan staf MMUI lainnya yang selalu memberikan bantuan dalam menjalani perkuliahan hingga selesainya tesis ini.
5. Ibu dan bapak yang selalu memberikan doa dan segalanya yang terbaik untuk anak-anaknya.
6. Adi, Tia dan Dimas, adik-adik yang selalu meberikan dorongan dan bantuannya selama kuliah.
7. Mas Tony yang selalu memberikan bantuan dan semangat serta motivasi yang tidak pernah habisnya hingga selesainya tesis ini

8. Sahabat-sahabat MMUI F-06 yang telah menunjukkan kebersamaan dan kekompakannya selama ini.
9. Semua pihak yang banyak membantu penulis baik dalam penyelesaian kuliah maupun karya akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anastasia Fasti Wuryandari  
NPM : 0606146974  
Program Studi : Magister Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS HUBUNGAN ANTARA JUMLAH ANGGOTA DAN  
INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS TERHADAP KINERJA BANK  
DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan



(Anastasia Fasti Wuryandari)

## ABSTRAK

Nama : Anastasia Fasti Wuryandari  
Program Studi : Magister Manajemen  
Judul : Analisis Hubungan Antara Jumlah Anggota dan Independensi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Bank di Indonesia

Industri perbankan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan industri lainnya, dilihat dari beberapa karakteristik utama yang dimilikinya. Karakteristik pertama adalah, industri ini adalah industri yang padat akan regulasi dan kedua adalah industri ini merupakan industri yang berbasis kepada kepercayaan. Di samping itu, penerapan *good corporate governance* (GCG) sudah menjadi tuntutan utama dalam keseluruhan industri di Indonesia. Dengan pertimbangan sifat-sifat dari karakteristik industri perbankan, sudah sepantasnya bank juga menerapkan GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa terjadinya krisis keuangan di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998 juga sebagian diakibatkan oleh penerapan GCG yang tidak baik. Berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, diketahui juga bahwa penerapan faktor-faktor GCG memberikan kontribusi pada tingkat kinerja bank, yang mana salah satunya ditunjukkan dengan tingkat *return on equity* (ROE). Oleh sebab itu, tesis ini akan meneliti hubungan antara beberapa faktor dalam GCG yang berupa karakteristik dewan komisaris (ukuran, pertemuan dan independensi), variabel kontrol berupa besarnya aset bank dan tingkat *non performing loan* (NPL) dengan kinerja bank yang ditunjukkan dengan ROE. Bank-bank yang diteliti merupakan bank komersial di Indonesia berdasarkan data pada tahun 2006-2007. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara karakteristik dewan komisaris yang ada terhadap kinerja bank. Hubungan yang signifikan ditunjukkan oleh tingkat aset yang dimiliki dan NPL bank terhadapkinerjanya.

Kata kunci :  
*Good Corporate Governance, Ukuran, Pertemuan dan Independensi Dewan Komisaris, Non Performing Loan, Return on Equity.*

## ABSTRACT

Name : Anastasia Fasti Wuryandari  
Study Program : Magister Manajemen  
Title : Analysis of Relationship between Board Size and  
Independency with Performance of Banks in Indonesia

Banking industry has uniqueness compared to other industry that could be seen from its major characteristics. The first is that the industry is a highly regulated industry and secondly, it is a trust based industry. Besides that, the implementation of good corporate governance (GCG) is becoming a major need in the whole industries in Indonesia. Considering the nature of the banking industry characteristic, it has been reasonable for banking to implement GCG in running its business. This is in addition to the fact of the financial crisis in Indonesia in the year 1997-1998 that was part of it caused by the poor implementation of GCG. Based on the prior studies, it is known that the implementation of GCG factors gave contribution on the bank performance, which one of it shown by the return on equity (ROE). Hence, this thesis will study the relationship of some characteristics in GCG, which were boards of commissioner characteristic (size, meeting and independence), control variables of bank assets and the non performing loan (NPL) with bank performance represented by ROE. Banks to be included in this study are Indonesian commercial banks based on 2006-2007 data. The result from this study shown that there is no significant relationship between the board of commissioner characteristics with bank performance. The significant relationship could be found between the total assets of the bank with NPL to its performance.

**Kata kunci : Good Corporate Governance, Size, Meeting and Independence of Board of Commissioner, Non Performing Loan, Return on Equity.**

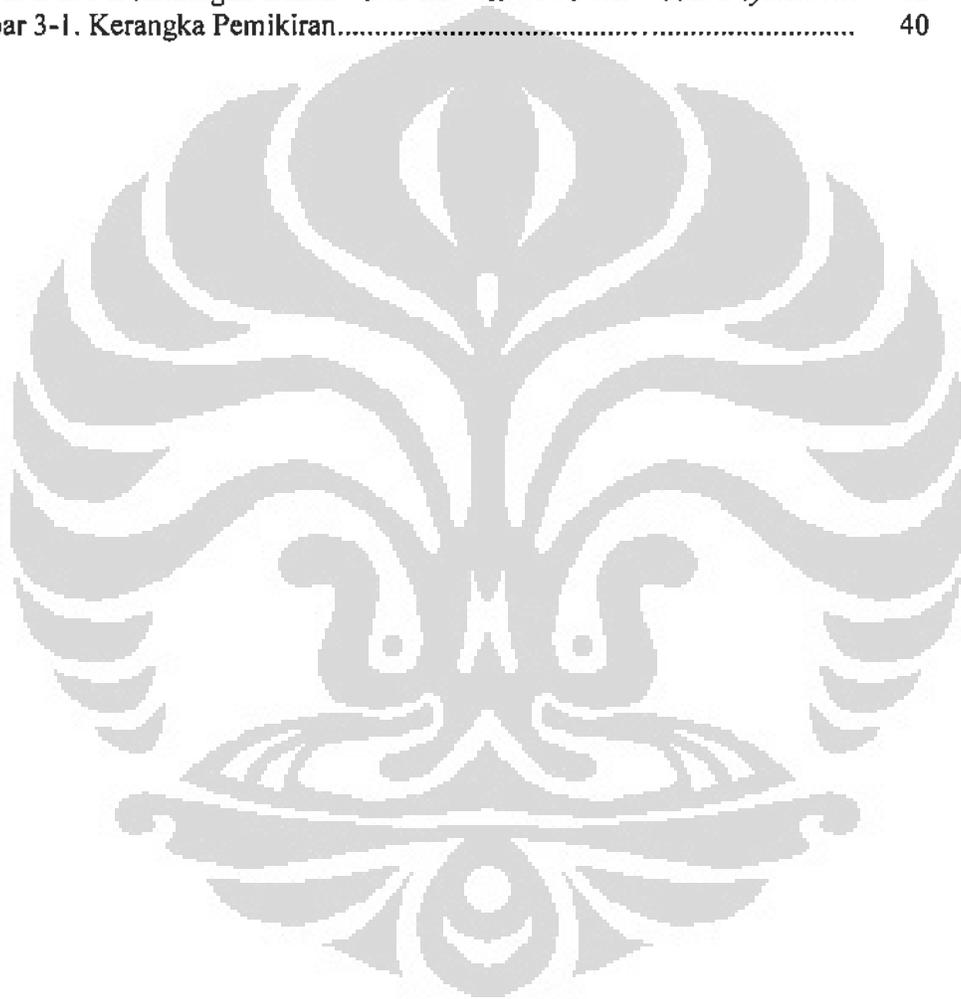
## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	6
1.3. Batasan Permasalahan.....	6
1.4. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan.....	7
1.5. Metodologi Penelitian.....	7
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
<b>2. LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	10
2.1.1. Pengelolaan Perseroan Melalui Suatu Dewan.....	11
2.1.2. Komisaris sebagai Penanggung Jawab GCG.....	13
2.1.3. Konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).....	16
2.1.4. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	17
2.1.5. GCG pada Dunia Perbankan.....	21
2.2. Manajemen Risiko Kredit.....	23
2.2.1. Manajemen Portfolio Kredit.....	24
2.2.2. <i>Review</i> pada Fungsi <i>Lending</i> dan Operasi.....	25
2.2.3. <i>Review</i> pada Kualitas Portfolio Kredit.....	27
2.3. <i>Non Performing Loan Portfolio</i> .....	28
2.4. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit.....	30
2.4.1. Kebijakan untuk Membatasi atau Mengurangi Risiko Kredit....	30
2.4.2. Klasifikasi Aset.....	31
2.4.3. Kebijakan <i>Loan Provisioning</i> .....	31
2.5. Kinerja Bank berdasarkan <i>Profit</i> dan <i>Earnings</i> .....	32
2.6. Penelitian yang Pernah Dilakukan.....	34
<b>3. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1. Kerangka Pemikiran.....	38
3.2. Hipotesis Penelitian.....	41
3.3. Model Penelitian.....	42
3.4. Operasionalisasi Variabel.....	44
3.5. Populasi dan Sampel.....	45

3.6. Uji Statistik.....	46
3.6.1. Model Regresi Berganda.....	46
3.6.2. Uji Multikolinearitas.....	47
3.6.3. Uji Autokorelasi.....	48
3.6.4. Uji Heteroskedastisitas.....	49
3.6.5. Uji Signifikansi Model.....	50
<b>4. PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>54</b>
4.1. Pendahuluan.....	54
4.2. Statistik Deskriptif.....	55
4.3. Hubungan Antar Variabel.....	59
4.3.1. Uji Multikolinearitas.....	59
4.3.2. Uji Autokorelasi.....	61
4.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.4. Analisis Terhadap Hasil Regresi Permodelan.....	65
4.4.1. Model I : Pengaruh karakteristik dewan komisaris, pemilihan auditor eksternal, besarnya aset, dan tingka NPL net terhadap ROE .....	66
4.4.1.1. Pengujian Hipotesis Model Secara Keseluruhan.....	67
4.4.1.2. Uji Koefisien Regresi Parsial.....	68
4.4.2. Model II: Pengaruh karakteristik dewan komisaris, pemilihan auditor eksternal dan besarnya asset terhadap NPL.....	72
4.4.2.1. Pengujian Hipotesis Model Secara Keseluruhan.....	73
4.4.2.2. Uji Koefisien Regresi Parsial.....	74
4.5. Kesimpulan.....	77
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
5.1. Kesimpulan.....	79
5.2. Keterbatasan Penelitian .....	81
5.3. Saran.....	81
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>83</b>

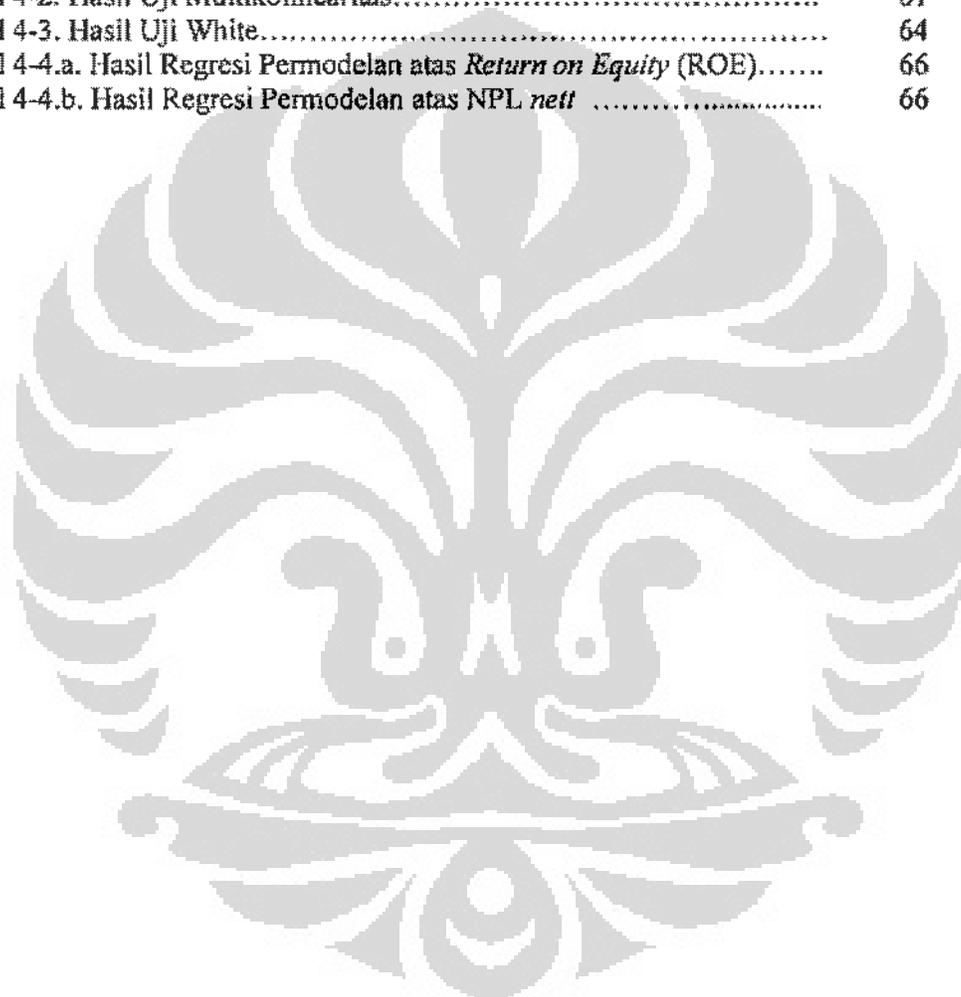
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Keterbukaan Informasi Bagu Pemegang Saham.....	11
Gambar 2-2. Perbandingan antara "One-tier" & "Two-tier" board system....	12
Gambar 3-1. Kerangka Pemikiran.....	40



## DAFTAR TABEL

Tabel 4-1. Tabel Statistik Deskriptif .....	56
Tabel 4-2. Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4-3. Hasil Uji White.....	64
Tabel 4-4.a. Hasil Regresi Permodelan atas <i>Return on Equity</i> (ROE).....	66
Tabel 4-4.b. Hasil Regresi Permodelan atas <i>NPL netf</i> .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

Data Return on Equity dan Variabel-variabel Lainnya .....	Lampiran 1
Output E-Views Model I .....	Lampiran 2
Output E-Views Model II .....	Lampiran 3
Output SPSS Model I .....	Lampiran 4
Output SPSS Model II .....	Lampiran 5



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Industri perbankan memiliki dua karakteristik yang membedakannya dengan industri lain pada umumnya. Karakteristik pertama yang dimiliki adalah dikenalnya industri perbankan sebagai industri yang padat regulasi (*highly regulated*). Hampir setiap segi kegiatan usaha bank tidak lepas dari cakupan regulasi dan pantauan serta *monitoring* dari regulator, yang di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Banyaknya ketentuan yang mengatur bisnis perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang diakibatkan oleh karakteristik industri perbankan yang kedua, yaitu industri perbankan merupakan bisnis yang berbasis pada kepercayaan.

Masyarakat yang menjadi nasabah bank menempatkan dana yang dimiliki pada bank tanpa jaminan penuh dari bank, bahkan dengan tingkat pengembalian yang ditentukan oleh bank. Dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut akan kembali disalurkan oleh bank sesuai dengan perannya sebagai intermediasi dan penggerak roda perekonomian. Dalam menjalankan aktivitasnya tersebut, bank menghadapi berbagai macam risiko, antara lain adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, hingga risiko legal dan risiko operasional. Untuk itu, bank perlu dikelola dengan hati-hati oleh manajemen yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Beberapa tahun ke belakang sebelum terjadinya krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil, yang mana antara tahun 1970-1996, pertumbuhan GDP (*Gross National Product*) riil rata-rata per tahun sekitar 6.7%. Namun di balik pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut, terdapat kelemahan struktural yang memiliki risiko sangat tinggi menggoyahkan stabilitas ekonomi nasional, khususnya dalam sektor keuangan dan perbankan. Salah satu kebijakan perekonomian yang memiliki dampak luas, terutama pada sektor perbankan yaitu kebijakan pada awal dekade 1990-an, yaitu adanya paket deregulasi finansial Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan Pakto 88. Salah satu ketentuan di

dalam Pakto 88 adalah adanya kemudahan perizinan dalam pendirian bank, yang mensyaratkan modal minimal hanya Rp 10 milyar. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah bank di Indonesia, dari yang hanya sekitar 111 bank pada tahun 1988, menjadi sebanyak 240 bank pada tahun 1995. Peningkatan jumlah bank inilah yang mendorong peningkatan pelepasan kredit ke sektor riil, sehingga memberi kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang moderat di awal tahun 1990-an.

Namun demikian, syarat yang cukup ringan bagi pendirian bank memiliki dampak negatif dan memicu peningkatan jumlah bank dan ekspansi perbankan yang cukup agresif. Hal ini marak diwarnai dengan *issue* kepemilikan silang (*cross ownership*) dan manajemen silang (*cross management*) di industri keuangan Indonesia. Dua hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi kepemilikan pada industri perbankan, sehingga semakin besar kecenderungan akan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) kepada grup sendiri. Kondisi inilah yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan imbas yang cukup parah di sektor perbankan.

Pada krisis ekonomi yang terjadi kurang lebih sepuluh tahun yang lalu tersebut, perbankan memang merupakan salah satu industri yang mengalami pukulan cukup berat. Awal mula krisis ekonomi pada Juli 1997 ditandai dengan adanya gejolak nilai tukar. Terhadap hal ini, pemerintah melakukan sejumlah tindakan, yaitu di antaranya pengetatan likuiditas, peningkatan suku bunga SBI dari 7% hingga mencapai 14%, dan pembekuan transaksi Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Kemudian pada 1 November 1997, IMF merekomendasikan 16 bank dilikuidasi, menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan semakin parah dan terjadilah penarikan dana besar-besaran yang menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan likuiditas. Likuidasi tersebut menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan biaya rekapitalisasi tinggi hingga mencapai Rp 650 triliun (termasuk BLBI) dan jumlah tersebut masih membebani anggaran hingga saat ini.

Setelah melalui masa krisis ekonomi, jumlah bank umum di Indonesia mengalami penurunan, dari sebanyak 237 bank di tahun 1997 menjadi hanya sebanyak 130 bank di tahun 2006 atau turun sebesar 45,2%. Hal ini terjadi sebagai

akibat dari setidaknya 67 bank yang dibekukan operasinya dan sebagian lagi melakukan *merger* dan akuisisi. Penurunan jumlah tersebut sebagian juga merupakan dampak semakin ketatnya standar yang harus dipenuhi bagi berdirinya suatu bank, seperti struktur permodalan, serta adanya *merger* atau akuisisi dan penutupan bank karena adanya masalah keuangan.

Bila diperhatikan dari latar belakang dan kondisi yang terjadi seperti telah dijelaskan di atas, salah satu penyebab utama industri perbankan mengalami pukulan yang sangat keras pada saat krisis berkaitan dengan manajemen perusahaan yang kurang baik. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari krisis finansial yang dialami negara ini adalah karena lemahnya penerapan konsep dan implementasi *good corporate governance* (GCG) dalam industri perbankan. Ketentuan pelaksanaan GCG pada bank umum bertujuan untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

GCG sendiri dapat dideskripsikan sebagai pengelolaan perusahaan yang bertumpu pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan/kewajaran untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Hal-hal tersebut tentu sangat diperlukan pula pada pengelolaan di industri perbankan, yang mana kepercayaan masyarakat merupakan komponen utamanya.

Salah satu faktor yang diperlukan untuk menciptakan *corporate governance* yang efektif, terutama setelah terjadinya krisis keuangan di Asia adalah peranan dewan komisaris dalam perusahaan, khususnya perbankan. Sebelumnya telah terdapat penelitian yang dilakukan untuk memahami pentingnya *governance* dalam suatu dewan, yaitu dewan komisaris pada suatu bank. Pertama, hal ini disebabkan karena *governance* pada bank-bank berbeda dengan perusahaan-perusahaan non bank (Macey & O'Hara, 2003). Alasan utama perbedaan ini disebabkan karena pentingnya keberadaan *stakeholder* bank yang lain seperti regulator dan kreditor. Direksi bank harus bertanggung jawab tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada depositor, nasabah, dan regulator.

Kedua, adanya kondisi di mana bank memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dan *mismatch* antara struktur dan likuiditas dari *assets* dan *liabilities*-nya, yang membuat peranan bank dalam perekonomian menjadi semakin penting. Ketiga, terjadinya *agency problem* merupakan sesuatu yang krusial untuk bank, karena bisnis atau operasional bank cenderung tertutup atau *opaque* (Levine, 2003).

Keempat, adanya *deposit insurance* membuat kondisi semakin tidak menguntungkan, karena menambah masalah "*moral hazard*" di antara pemegang saham bank dan *debt-holders*. Dengan adanya *deposit insurance*, para depositor atau *debt-holder* akan memiliki akses yang lebih sedikit untuk melakukan monitor terhadap manajemen bank. *Deposit insurance* tersebut dapat mengaburkan proses investasi dan pembiayaan oleh bank, karena manajer bank dapat saja ingin mendapatkan insentif yang lebih besar dengan mengambil risiko yang lebih besar (Merton, 1977).

Alasan terakhir mengenai pentingnya *corporate governance* dalam industri perbankan, dikemukakan oleh Skully (2002), yang menyatakan bahwa *corporate governance* penting karena hal tersebut mengurangi risiko dana para pembayar pajak yang dapat digunakan sebagai mitigasi atau untuk menyelesaikan suatu krisis dan hal tersebut juga dapat berperan dalam mengendalikan suatu praktik pemberian pinjaman pada pihak yang masih memiliki keterkaitan dengan bank.

Pada laporan oleh Higgs di Inggris (Higgs, 2003) dan undang-undang di Amerika mengenai *corporate governance*, yaitu *USA's Sarbanes-Oxley Act of 2002*, menekankan pentingnya peranan independensi dewan kepengurusan dalam perusahaan terbuka dan tercatat di bursa. Pada penelitian yang dijadikan acuan pada penelitian ini, dilakukan pembedaan antara istilah yang disebut dengan *outside director*, yaitu *non-executive director* dalam dewan kepengurusan, sedangkan *independent director* merupakan *outside director* dalam dewan perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan kecuali pada kepengurusan perusahaan tersebut.

Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat hasil yang bervariasi pada hubungan antara susunan dewan kepengurusan

perusahaan dengan kinerja perusahaan. Sebagian besar penelitian mengenai *governance* menemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara keberadaan *outside director* dengan kinerja perusahaan (Bhagat & Black, 1999; Hermalin and Weisbach, 1991). Namun, Rosenstein & Wyatt (1990) mengindikasikan bahwa ada hubungan positif yang signifikan secara statistik antara *response* harga saham dengan proporsi dewan yang independen. Hasil yang bervariasi dari literatur sebelumnya tersebut disebabkan karena hubungan *endogenous*, yaitu hal-hal yang disebabkan dari dalam perusahaan sendiri (Hermalin & Weisbach, 1991, 2003) dan hubungan sebab akibat (Kole, 1997) antara komposisi dewan kepengurusan dengan kinerja perusahaan.

Berdasarkan kondisi demikian, cukup menarik untuk diteliti faktor-faktor penting apa sajakah yang mendukung praktik pelaksanaan GCG dalam sektor perbankan, terutama yang mempengaruhi kinerja bank tersebut. Secara lebih spesifik, akan dipergunakan salah satu komponen penting dalam GCG, yaitu susunan dewan komisaris. Salah satu komponen utama tersebut akan dihubungkan dengan tingkat kinerja perusahaan perbankan, yang ditunjukkan dengan *return on equity* (ROE). Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh dengan jumlah harta neto pemegang saham (modal disetor, laba ditahan dan laba/rugi berjalan). ROE merupakan tolok ukur profitabilitas yang paling penting bagi pemegang saham.

Hal ini tentu menjadi dasar yang kuat dalam melakukan penelitian implikasi *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan melalui hubungan antara komposisi dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Kemudian akan diteliti pula mengenai pengaruh komposisi dewan komisaris perusahaan tersebut secara langsung dengan salah satu indikator yang menyatakan tingkat kesehatan bank, yaitu *non performing loan* (NPL). *Non performing loan* merupakan rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan oleh bank (tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain). Pentingnya diteliti mengenai hubungannya dengan rasio NPL disebabkan karena pemberian kredit oleh perbankan juga berkaitan dengan praktik GCG, yang mana terdapat berbagai macam pertimbangan yang diambil pada saat pelepasan suatu kredit tersebut. Pertimbangan tersebut dapat berupa suatu kondisi kuantitatif maupun kualitatif.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan selama kurun waktu 1999 - 2003 terhadap bank-bank di Thailand, suatu negara di Asia Tenggara yang juga mengalami krisis keuangan serupa dengan di Indonesia, terdapat beberapa penemuan menarik. Penemuan tersebut berupa pengaruh komponen penting GCG seperti susunan dewan komisaris (pada struktur perusahaan termasuk bank di Thailand, digunakan istilah *board of directors*) terhadap praktik pelaksanaan GCG. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai kondisi tersebut pada industri perbankan di Indonesia.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah yang akan diberlakukan pada penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah hubungan antara karakteristik dewan komisaris (ukuran, aktivitas, dan independensi) dengan kinerja perbankan?
- Bagaimanakah hubungan antara karakteristik dewan komisaris (ukuran, aktivitas, dan independensi) dengan kualitas kredit yang dilepaskan, yang dinyatakan dalam *non performing loan* ?

## 1.3. Batasan Permasalahan

Sorotan utama dalam penelitian ini adalah pada tingkat *non performing loan* dalam laporan keuangan bank-bank di Indonesia beserta kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan ROE serta hubungannya dengan komponen utama GCG. Komponen utama GCG yang akan ditelaah lebih mendalam tersebut adalah karakteristik dewan komisaris. Untuk itu dasar pembahasan yang akan dipergunakan adalah laporan tahunan (*annual report*) bank-bank *go public* maupun *non go public* yang mana di dalamnya terdapat laporan keuangan yang telah diaudit serta akan dipergunakan pula data lainnya yang dapat diakses secara umum bila diperlukan.

#### 1.4. Tujuan Penulisan & Manfaat Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- Mengetahui secara lebih mendalam seberapa jauh komponen GCG yang berupa karakteristik dewan komisaris memiliki hubungan secara langsung terhadap tingkat kinerja pada bank-bank di Indonesia dan tingkat *non performing loan* yang ada.

Manfaat dari penulisan ini sendiri adalah sebagai berikut :

- Bagi manajemen, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan komponen penting GCG dan karakteristik penting yang dimilikinya, agar dapat dilihat implikasinya pada tingkat *non performing loan* bank dan tingkat kinerja bank.
- Bagi regulator, penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pengaruh komponen penting dalam GCG yang memiliki implikasi pada tingkat *non performing loan* dan tingkat kinerja suatu bank, sehingga regulator dan pembuat kebijakan dapat memberikan perhatian lebih pada elemen-elemen penting GCG tersebut serta karakteristik utama yang dimilikinya.
- Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat *non performing loan* pada bank, terutama dilihat berdasarkan tingkat aset yang dimiliki, serta penerapan GCG yang melatarbelakangi. Diharapkan pula diperoleh gambaran mengenai penerapan manajemen risiko pada bank melalui peranan dewan komisaris, sehingga diperoleh tingkat *non performing loan* tertentu.

#### 1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data sekunder, seperti laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen, *annual report* bank-bank, bahan yang telah dipublikasi lainnya, serta tinjauan pustaka. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti *website* resmi bank-bank, Bursa Efek Indonesia, dan *website* Bank Indonesia, serta sumber lainnya. Kemudian dari data yang diperoleh akan dilakukan studi literatur untuk meneliti kesesuaian dengan teori yang ada.

Studi lapangan dapat juga dilakukan untuk melihat kesesuaian antara teori yang dijelaskan pada literatur dengan praktik yang terjadi di lapangan.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang saling terkait satu dan lainnya, yang mana tiap bagian akan mendukung penjelasan topik utama mengenai hubungan antara unsur penting GCG, yaitu karakteristik dewan komisaris terhadap tingkat *non performing loan* yang ada dan tingkat kinerja bank-bank di Indonesia. Adapun sistematika penulisan karya akhir ini adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan

Bab awal tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini, dan merupakan penjelasan secara umum poin-poin penting yang akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan termasuk gambaran umum industri perbankan di Indonesia, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

- Bab II : Landasan Teori

Bab ini merupakan penjabaran dari teori-teori yang mendasari penelitian ini, yang akan digunakan sebagai landasan dilakukannya penelitian dan pembahasan lebih lanjut pada bab berikut. Pembahasan teori yang akan dilakukan antara lain adalah penjelasan mengenai GCG dan penerapannya pada industri perbankan di Indonesia, uraian tentang majamen risiko kredit dan *non performin loan*, uraian mengenai bagaimana secara keseluruhan bank menciptakan *profit* dan *earnings* bagi bank tersebut, serta uraian tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berikut hasilnya.

- **Bab III : Metodologi Penelitian**

Bab ini menjabarkan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan. Hal lain yang akan dijelaskan adalah teknik pengumpulan data, metode analisis yang diterapkan beserta penggunaan program komputer yang mendukung (SPSS dan atau E-Views).

- **Bab IV : Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas hasil yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai dugaan-dugaan yang telah dipaparkan pada bagian awal penelitian.

- **Bab V : Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini, akan ditarik kesimpulan setelah dilakukan analisis secara menyeluruh dari bab-bab sebelumnya, serta diberikan juga saran-saran yang mendukung bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam praktik pelaksanaan GCG, baik itu bagi dunia usaha, maupaun bagi regulator yang ada di Indonesia.

## BAB 2 LANDASAN TEORI

### 2.1. Good Corporate Governance (GCG)

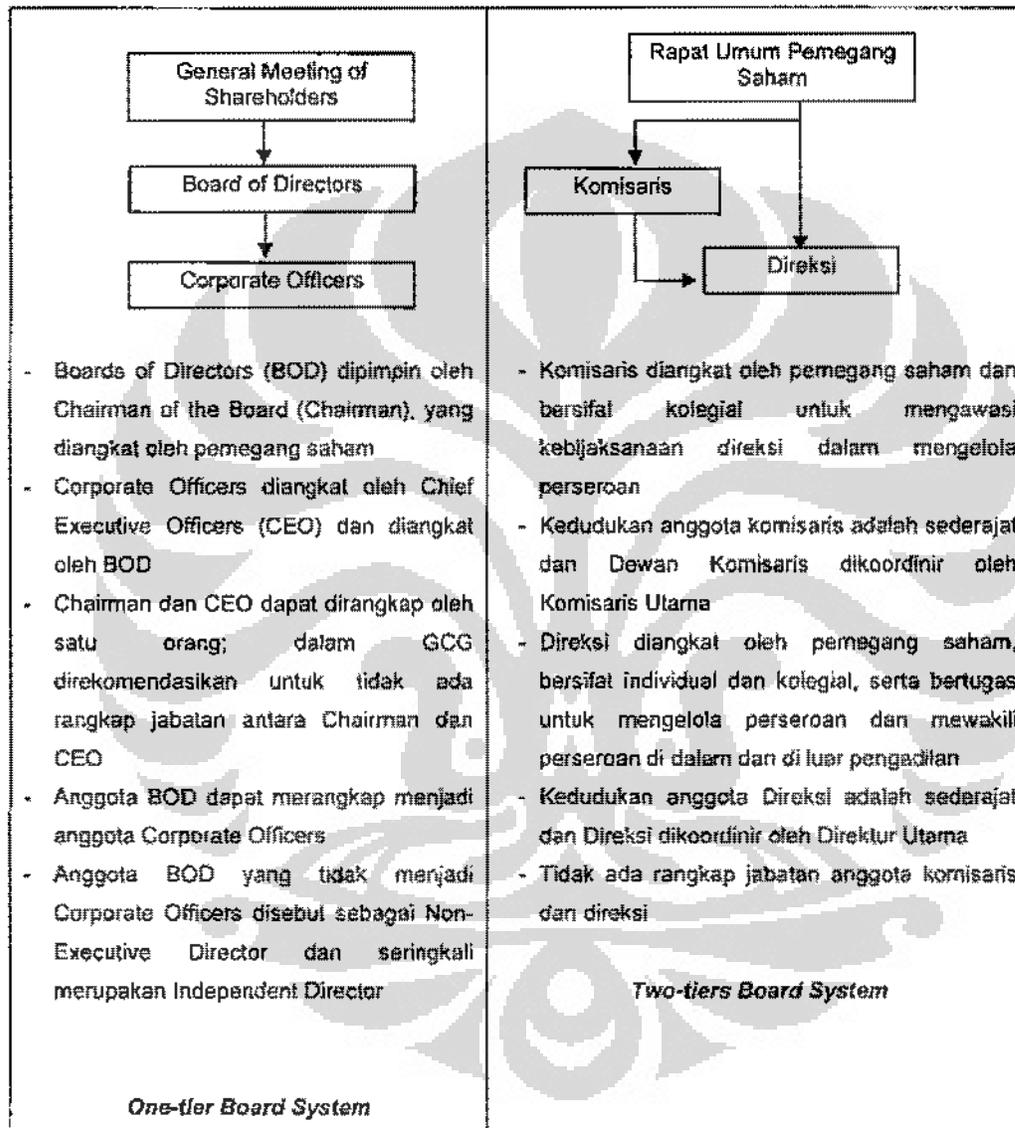
Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda Indonesia, menyebabkan wacana mengenai GCG menjadi topik yang sering dibicarakan. Krisis yang terjadi tersebut diperkirakan oleh banyak pihak sebagai cerminan kurangnya pelaksanaan GCG yang seharusnya ada dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bank Dunia (2002) juga menyatakan hal yang serupa bahwa krisis finansial yang melanda Indonesia sebagai akibat lemahnya praktik, implementasi dan atau dilanggarnya prinsip-prinsip GCG. Bahkan *Asian Corporate Governance Association* menunjukkan bahwa pada kurun waktu penelitian 2000-2004, peringkat GCG Indonesia masih berada pada peringkat terbawah dibandingkan sembilan negara Asia Pasifik.

Bank Indonesia (BI) dan dunia perbankan pada umumnya tidak lepas pula dari kurang baiknya pelaksanaan GCG sehingga menyebabkan terjadinya krisis yang menyebabkan keterpurukan perekonomian nasional. Untuk itu, pelaksanaan GCG di dunia perbankan menjadi sesuatu yang mendesak, dan BI sebagai regulator dan pengawas harus menjalankan peranannya dengan lebih baik. Pengawasan pelaksanaan GCG pada perusahaan secara umum yang telah dipraktekkan adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam di pasar modal. Oleh sebab itu, perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai peraturan Bapepam dalam pelaksanaan prinsip GCG, kemudian akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konsep-konsep GCG itu sendiri, serta secara spesifik akan dibahas mengenai penerapannya di industri perbankan.

Ketentuan tentang penerapan prinsip-prinsip GCG di pasar modal dapat dibedakan ke dalam dua ruang lingkup pengaturan yang mewajibkan setiap tindakan, kegiatan dan transaksi emiten atau perusahaan publik mewujudkan praktik pengelolaan usaha yang baik. Ruang lingkup pengaturan tersebut adalah : (a) Peraturan yang berasal dari peraturan-peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dan (b) Peraturan pencatatan yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek



kepengurusan perseroan hanya dilakukan oleh satu organ saja. Sedangkan untuk Indonesia, sesuai dengan UUPT, yang disebut organ perseroan adalah (i) Rapat Umum Pemegang Saham; (ii) Direksi dan (iii) Komisaris. Sistem kepengurusan di Indonesia tersebut terdiri dari dua organ, sehingga disebut dengan *"two-tiers boards system"*.



Sumber: Good Corporate Governance pada Bank (Leo J. Susilo)

**Gambar 2.2. Perbandingan antara "One-tier" & "Two-tiers" board system**

Untuk sistem Anglo-Saxon, kewenangan dari pemegang saham antara lain adalah (i) mengangkat dan memberhentikan direksi, (ii) menyetujui dan

menolak tindakan-tindakan pengurusan oleh direksi, (iii) menyetujui dan menolak perubahan anggaran dasar perusahaan (*articles of incorporation*) dan (iv) menyetujui atau menolak perubahan yang mendasar dari operasi perusahaan, seperti misalnya merger, akuisisi, likuidasi aset perusahaan. Sedangkan kewenangan direksi dirumuskan dalam kata-kata "*the business and affairs of a corporation shall be managed by the board of directors*". Akibat dari perkembangan perusahaan yang makin membesar, maka terjadi pembagian tugas antara direksi dan manajemen (*Corporate Officers*), akan tetapi kewenangan tetap pada direksi.

Untuk tata hukum di Indonesia yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental, pengaturan organ perseroan ini dapat dijumpai pada UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Dalam pengertian ini maka kepengurusan perseroan dilakukan oleh direksi dan komisaris.

Direksi adalah penanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi.

### 2.1.2. Komisaris sebagai Penanggung Jawab GCG

Enforcement GCG bagi bank merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sebagai syarat mutlak terciptanya sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari direksi, komisaris dan seluruh jajaran pejabat serta karyawan bank dalam melaksanakan GCG pada setiap operasi bank. Zulkarnaen Sitompul (2005) menyatakan bahwa komitmen ini meliputi tiga hal:

- Kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan
- Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- Penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customers principle*)

Komitmen pelaksanaan GCG ini harus dimulai sejak pendirian bank, dan selama bank beroperasi. Aktor utama dalam proses ini adalah pemegang saham, komisaris, dan direksi. Komisaris dan direksi yang mempunyai kewajiban

untuk memastikan bahwa penerapan GCG pada bank akan berlangsung pada seluruh jajaran dari tingkat teratas hingga karyawan yang terendah. Dewan komisaris sebagai salah satu pemegang tanggung jawab utama dalam pelaksanaan GCG di bank akan dibahas dan diteliti secara khusus di dalam tulisan ini. Hal ini didukung oleh tugas-tugas dewan komisaris yang khusus dan berbeda dengan organ perusahaan lainnya, terutama karena adanya komite khusus yang dibentuk oleh komisaris dan bertugas untuk membantu tugas-tugas komisaris. Untuk itu, tugas dan kewajiban khusus dewan komisaris akan dijelaskan secara lebih lanjut.

#### Kewajiban Komisaris Terkait dengan Pelaksanaan GCG

Tugas pengawasan komisaris terkait dengan pelaksanaan GCG pada bank umum meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Menyusun pedoman mekanisme kerja komisaris dan pedoman kerja perangkat lainnya (komite-komite) sesuai dengan prinsip dan ketentuan pelaksanaan GCG yang berlaku.
- b. Memastikan berjalannya fungsi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern dalam melaksanakan sistem pengendalian intern
- c. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan efektif
- d. Memastikan bahwa penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- e. Memastikan bahwa bank telah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- f. Memastikan bahwa bank memenuhi ketentuan aspek transparansi mengenai kondisi keuangan dan non-keuangan, informasi produk dan penggunaan data nasabah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- g. Memastikan bahwa sistem pelaporan internal berjalan dengan efektif dan menunjang proses manajemen operasi bank, serta telah terdapat prosedur untuk menangani benturan kepentingan dalam hal tersebut terjadi.
- h. Memastikan bahwa pelaporan pelaksanaan dan penilaian GCG telah dilakukan sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia

### Pedoman Kerja Komisaris sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG

Dalam rangka pelaksanaan GCG, komisaris sebagai organ yang mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam menjalankan perseroan wajib untuk:

- a. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komisaris (Board Manual) yang minimal mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat-rapat.
- b. Membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi lengkap dengan sasaran tugas, komposisi, pedoman kerja dan pengaturan rapat-rapat (*Committee Charter*).
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan wajib untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, antara lain dengan menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, komisaris dilarang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan operasional kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Memberi tahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (i) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan (ii) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Pelanggaran terhadap kewajiban di atas oleh komisaris diancam sanksi administratif. Adapun ketentuan komposisi dewan komisaris pada bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Jo No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum adalah sebagai berikut:

- Jumlah anggota dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama

- Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 (satu) tahun.

### 2.1.3. Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Telah banyak pengertian dan penjelasan dari *Good Corporate Governance* yang berasal dari berbagai sumber. Pengertian yang pertama kali dikeluarkan oleh *Cadbury Committee* (1992) menyatakan bahwa "*corporate governance* adalah sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perseroan".

Kemudian *International Chamber of Commerce* (2003) memberikan definisi bahwa "*corporate governance* adalah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat, dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut. *Corporate Governance* juga harus memastikan bahwa direksi bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pencapaian sasaran perseroan serta memastikan bahwa perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku."

Di Indonesia, berdasarkan definisi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 yaitu *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan penghasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai etika.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *corporate governance* berkaitan dengan:

- Seperangkat tata hubungan yang diatur dalam sebuah struktur, proses, dan prosedur bagi organ perseroan dan pemangku kepentingan lainnya
- Tata hubungan ini harus sesuai dengan peraturan perundangan, etika, dan kebiasaan praktik bisnis yang sehat.
- Tata hubungan ini diatur dalam prinsip-prinsip tertentu, di Indonesia dikenal sebagai TARIF (*transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*)
- Melalui tata hubungan ini perseroan akan diarahkan dan dikendalikan dengan menetapkan sasaran perseroan serta cara-cara untuk memantau pencapaian kinerja.
- Keseluruhan proses ini diarahkan untuk pencapaian sasaran jangka panjang perseroan yaitu warga negara korporasi (*good corporate citizen*) yang sehat, kuat, dan mampu bersaing guna meningkatkan nilai pemegang saham.

#### 2.1.4. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Prinsip dalam GCG biasa disebut TARIF, yang merupakan akronim dari *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness*. Pengertian dari prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan definisi Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002.

##### a. Transparency (Keterbukaan)

*Transparency* yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan GCG. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan berarti seluruh pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan mengetahui dengan jelas pertimbangan yang diambil dalam pengambilan keputusan dan implementasi dari keputusan tersebut. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pertimbangan lain sebelum proses itu dijalankan. Dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut juga harus dijabarkan kepada pihak-pihak yang terlibat. Transparansi merupakan kondisi yang menciptakan *fairness* dalam transaksi.

Aplikasi dari prinsip ini terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, hubungan industrial dan transaksi bisnis dengan pelanggan, seperti pembelian surat berharga, ketentuan penempatan deposito berjangka, dan sebagainya.

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan tentang perusahaan merupakan akuntabilitas perusahaan terhadap publik dan para *stakeholder*. Dengan adanya keterbukaan ini, maka bagi para *stakeholder* dapat mengetahui dampak bekerjasama dengan perusahaan tersebut. Praktek keterbukaan informasi dilakukan secara optimal dalam publikasi Laporan Tahunan dan publikasi Rencana Bisnis Perseroan, serta laporan bisnis lainnya.

#### **b. Accountability (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas, atau kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan efektif. Prinsip ini juga merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG. Berasal dari kata *accountability* yang memiliki makna *answerability*, *liability*, dan *responsibility*, maka prinsip ini menunjukkan adanya tuntutan untuk menjawab semua pertanyaan atas pelaksanaan tugas pada suatu fungsi.

Pengertian akuntabilitas secara implisit juga mengandung pengertian terhadap pengukuran hasil kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan etika. Oleh karena itu bagi pihak yang menuntut akuntabilitas hal ini berarti adanya *performance appraisal* dan audit eksternal. Sedangkan untuk pelaksana tugas berarti perlu adanya sistem pengendalian intern. Praktik eksternal audit, kejelasan tugas di antara direksi dan komisaris, *performance appraisal* untuk direksi, komisaris, dan seluruh jabatan di perseroan, ditaatinya kode etik korporasi, sistem pengendalian intern, merupakan indikasi terlaksananya penerapan akuntabilitas dengan baik.

Penerapan prinsip akuntabilitas ini terkait sangat erat dengan prinsip *responsibility* dan *independency* dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut.

### **c. Responsibility (Pertanggungjawaban)**

Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, prinsip pertanggungjawaban ini sangat erat terkait dengan prinsip akuntabilitas, karena akuntabilitas merupakan ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban. Apabila suatu fungsi dan tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan norma-norma etika, hasil kerja tersebut dengan mudah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Salah satu hal penting dalam penerapan prinsip ini adalah memastikan apakah dalam operasi perusahaan semua kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sudah diperhatikan dan dipenuhi. Misalkan ketentuan tentang laporan keuangan dan perpajakan, ketentuan mengenai perlindungan konsumen, ketentuan perburuhan, ketentuan tentang persaingan usaha, dan sebagainya. Untuk ketentuan di mana pihak luar juga ikut berperan, biasanya hal itu mendapatkan perhatian lebih, seperti pemenuhan ketentuan perpajakan, ketentuan perburuhan, sertifikasi produk. Tetapi untuk hal-hal tertentu dimana regulator kurang aktif berperan, biasanya hal itu agak terabaikan, misalkan perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan lingkungan hidup. Pelaksanaan internal audit yang komprehensif dan sistem pengendalian internal yang baik dapat membantu memastikan pelaksanaan kewajiban ini.

### **d. Independency (Kemandirian)**

Kemandirian, adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penerapan prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip akuntabilitas. Dapat dikatakan prinsip akuntabilitas adalah muara dari penerapan prinsip pertanggungjawaban dan kemandirian. Melalui prinsip kemandirian, maka prinsip pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, terbebas dari benturan kepentingan yang mungkin ada,

baik karena kepentingan sendiri, kepentingan golongan, maupun kepentingan "balas budi".

Penerapan prinsip kemandirian sebetulnya menegaskan kembali bahwa direksi dan komisaris dalam menjalankan tugasnya haruslah mendahulukan kepentingan dan usaha perseroan, sebagaimana telah diatur dalam UUPT. Dalam hal ini terjadi benturan kepentingan, anggota direksi yang terkait tidak berhak lagi untuk bertindak mewakili perseroan (Pasal 84 ayat (1) UUPT). Dalam pengertian yang sama hal ini diperluas kepada seluruh pejabat struktural dalam perseroan.

Pengelolaan secara profesional dari prinsip kemandirian terkait dengan adanya *duty of care* bagi direksi, yang mensyaratkan adanya *skill and dilligence* dalam menjalankan tugasnya. Penerapan prinsip ini dalam prakteknya adalah adanya *fit and proper test* bagi anggota direksi dan komisaris. Dalam praktek penerapan GCG *fit and proper test* ini dapat diperluas kepada seluruh pejabat struktural perseroan dalam skala yang sesuai dengan jabatannya. Pembuatan pakta integritas dan kontrak manajemen juga membantu untuk menegakkan kemandirian direksi dan komisaris.

#### e. Fairness (Kewajaran)

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan prinsip kewajaran ini erat kaitannya dengan prinsip transparansi. Tanpa transparansi akan sulit, bahkan hampir tidak mungkin terjadi *fairness*.

Dari uraian diatas jelas bahwa kewajaran baru dapat dilaksanakan jika terdapat kejelasan dan transparansi. Kembali pada tiga macam potensi konflik dalam perseroan, yaitu:

- i. Konflik antara manajemen dan pemegang saham
- ii. Konflik antar pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas dan minoritas
- iii. Konflik antara perseroan dengan para pemangku kepentingan.

Dalam upaya meredam konflik, penting bagi organ perseroan untuk menerapkan prinsip kewajaran ini dalam bentuk kejelasan hak dan kewajiban, serta tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Ketersediaan Pedoman GCG (*GCG Code*) dan Pedoman Direksi dan Komisaris (*Board Manual*) akan membantu mengurangi potensi konflik tersebut dan memperjelas hak dan kewajiban, serta tugas dan kewajiban masing-masing fungsi organ perseroan. Seyogyanya kedua pedoman tersebut harus lebih rinci daripada perundangan yang ada.

Pedoman Etika Korporasi, yang terdiri dari Pedoman Etika Usaha dan Pedoman Etika Kerja, merupakan norma-norma untuk mengatur hubungan antara perseroan dengan para pemangku kepentingan, serta norma-norma untuk mengatur hubungan antar karyawan. Pedoman ini akan membantu mereduksi potensi konflik antara perseroan dengan para pemangku kepentingan. Akan tetapi perlu diingat bahwa ketersediaan pedoman saja belum cukup. Apa yang tertulis dalam pedoman tersebut haruslah dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Ini semua memerlukan proses internalisasi yang tidak sederhana dan memakan waktu, serta konsistensi tinggi, terutama dari para pemimpin perusahaan.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah penyelarasan (*alignment*) dari prinsip-prinsip yang dituangkan dalam pedoman-pedoman GCG di atas dengan kebijakan manajemen (*management policy*) dan pedoman operasional (*standard operating procedures*) lain, sehingga *spirit* dari prinsip-prinsip GCG memang tercermin dalam setiap proses bisnis. Melalui penyelarasan ini maka keterlibatan seluruh jajaran dalam penerapan GCG, menjadi lebih terarah dan terpadu.

#### 2.1.5. GCG pada Dunia Perbankan

Karena karakteristik industrinya yang khusus, beberapa pakar menyatakan terdapat kondisi spesifik pada bank dalam penerapan konsep GCG. Dari segi operasional, Ross Levine (2003, 2005) menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lain, yaitu (i) industri perbankan relatif lebih kurang transparan (*opaque*) dibandingkan dengan industri lainnya karena adanya informasi yang asimetris, dan (ii)

intervensi regulator sangat tinggi dalam industri perbankan, baik secara makro yaitu pada pasar jasa perbankan maupun secara mikro terhadap masing-masing bank. Hal senada juga diungkapkan Wiraguna Bagoes Oka dari Bank Indonesia yang merujuk pada hal yang sama ketika menyatakan bahwa GCG pada perbankan memiliki dua elemen penting dalam penerapannya, yaitu transparansi dan regulasi.

Dari segi teoritis, Ciancanelli dan Gonzales (2000) juga menemukan bahwa konsep *Agency Theory* yang banyak digunakan oleh para pakar sebagai landasan teoritis *corporate governance* ternyata tidak dapat sepenuhnya digunakan, karena adanya intervensi regulator yang dominan dalam industri perbankan. Selain itu juga *asymmetric information* yang terjadi menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan industri lainnya, sehingga menimbulkan "opaqueness" dalam industri perbankan sebagai mana disebut oleh Levine.

Meningkatnya kebutuhan akan pentingnya *corporate governance* pada bank juga disebabkan karena meningkatnya partisipasi pemegang saham umum atau masyarakat pada bank yang tercatat dalam bursa, bermunculannya bank swasta umum dan adanya keperluan bank untuk melakukan akses pada pasar modal. Perkembangan ini mengharuskan bank untuk menerapkan tatanan *corporate governance* yang memiliki kredibilitas dan diterima secara luas bila suatu bank tersebut bertujuan untuk menarik modal, khususnya *global capital*.

Guna memahami hal-hal khusus tersebut dan untuk lebih mengetahui implikasinya pada penerapan GCG di dunia perbankan, maka akan dijabarkan secara lebih mendalam sebagai berikut:

#### **a) Informasi Asimetri dalam Industri Perbankan**

Kondisi di mana terjadinya informasi yang asimetri pada industri perbankan terjadi di antara deposan, manajer bank, pengurus bank, debitur, pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar informasi asimetri yang terjadi, maka semakin sulit bagi pihak luar untuk mengontrol *governance* dari suatu bank. Akibat informasi asimetri tersebut, peran *market discipline* sebagai mekanisme pengawasan menjadi kurang signifikan, selain itu *entry barrier* dalam industri perbankan juga ikut membantu peran *market discipline*

dalam pengawasan. Masalah integritas sumber daya manusia juga menambah beban pengawasan, sehingga pengawasan bank lebih ditekankan pada kepatuhan pada regulasi yang diberlakukan pada bank.

#### b) Peran Regulasi dalam *Corporate Governance* Perbankan.

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Ciancinelli dan Gonzales menemukan tiga macam pengaruh regulasi terhadap *corporate governance*, yaitu (i) regulasi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi *governance* bank; (ii) akibat adanya regulasi, maka pasar industri perbankan menjadi *regulated market*; (iii) secara tidak langsung regulasi merupakan representasi dari kepentingan publik.

## 2.2. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perbankan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Hal ini disebabkan karena pelepasan kredit merupakan bisnis utama bank dalam menciptakan pendapatannya. Oleh sebab itu, penilaian kualitas baik itu kredit baru yang akan dilepaskan, maupun *review* dari portfolio kredit yang sudah ada merupakan suatu hal yang krusial dan memerlukan suatu pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan.

Risiko kredit, atau yang dapat disebut juga dengan risiko *counterparty*, dapat didefinisikan sebagai suatu kemungkinan debitur atau suatu *issuer* instrumen finansial tertentu tidak dapat membayar bunga atau membayar kembali nilai pokok pinjaman, sesuai dengan kondisi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit. Hal ini sudah menjadi bagian yang sangat melekat pada dunia perbankan. Risiko dapat berarti bahwa pembayaran dapat tertunda, dan bahkan tidak terbayar sama sekali, yang mana dapat menyebabkan permasalahan *cash flow* pada bank dan mempengaruhi likuiditasnya. Risiko kredit ini masih merupakan penyebab utama kegagalan bank. Hal tersebut dikarenakan biasanya

lebih dari 80% dari neraca bank berhubungan dengan aspek manajemen risiko.

Tiga tipe dari risiko kredit adalah:

- *personal* atau *consumer risk*
- *corporate* atau *company risk*
- *sovereign* atau *country risk*

Karena potensi kerugian dari risiko kredit dapat menjadi cukup signifikan, maka penting untuk dilakukan evaluasi komprehensif dari bank untuk melakukan penilaian, administrasi, pengawasan, memberikan kredit dan melakukan *recovery*, garansi, *advances*, serta bentuk kredit lainnya. *Review* manajemen risiko kredit secara keseluruhan akan memasukkan evaluasi dari kebijakan manajemen risiko kredit dan praktek dari bank. Evaluasi ini setidaknya juga menentukan kecukupan dari informasi keuangan yang diterima dari debitur maupun *issuer* instrumen keuangan. Informasi keuangan ini menjadi dasar bagi bank untuk melakukan investasi pada instrumen keuangan tertentu tersebut atau pemberian kredit, dan juga *assessment* secara berkala yang dikarenakan risiko yang selalu berubah-ubah.

Pembahasan mengenai risiko kredit berfokus pada portfolio kredit, namun penentuan *creditworthiness* dari masing-masing *counterparty* juga menjadi dasar keputusan penting untuk pemberian kredit. Untuk lebih memahai risiko kredit dan kaitannya dengan *corporate governance*, maka akan dibahas juga aspek-aspek yang berkenaan dengan risiko kredit ini.

### 2.2.1. Manajemen Portfolio Kredit

Pengawas bank, yang dalam hal ini adalah bank sentral menetapkan pentingnya kebijakan formal yang ditetapkan oleh *board of directors* dan diimplementasikan oleh manajemen. Kebijakan *lending* harus memuat *outline* dari ruang lingkup dan alokasi fasilitas kredit bank serta tata cara bagaimana kredit tersebut dikelola. Suatu kebijakan kredit yang baik tidak harus suatu kebijakan yang ketat. Fleksibilitas diharapkan tetap ada, untuk memungkinkan reaksi yang cepat dan adaptasi secara lebih awal dari kondisi yang selalu berubah pada *earning assets mix* dari bank dan *market environment*.

Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dari kebijakan pemberian kredit yang baik antara lain adalah:

- *Limit on total outstanding loan*
- *Geographic limits*
- *Credit concentration*
- *Distribution by category*
- *Type of loans*
- *Maturities*
- *Loan pricing*
- *Lending authority*
- *Appraisal process*
- *Maximum ratio of loan amount to the market value of pledged security*
- *Financial statement disclosure*
- *Impairment*
- *Collection*
- *Financial information*

Pada akhirnya, kebijakan perkreditan harus diikuti dengan pedoman tertulis lainnya untuk departement-departemen tertentu pada bank. Kebijakan dan prosedur tertulis yang telah disetujui dan dilaksanakan di berbagai departemen harus mengacu pada kebijakan perkreditan bank secara umum. Ketiadaan kebijakan, pedoman dan prosedur tertulis merupakan suatu kekurangan dan manandakan bahwa *board of directors* tidak menjalankan kewajibannya dengan sebagai mana mestinya.

### 2.2.2. Review pada Fungsi Lending dan Operasi

*Board of directors* sebagai pelaksana tanggung jawab atas nama *depositor* dan *shareholder*, harus memastikan bahwa fungsi *lending* suatu bank memenuhi tiga tujuan utama sebagai berikut:

- Kredit seharusnya diberikan dengan *sound and collectible basis*
- Dana diinvestasikan dengan semestinya untuk kepentingan *shareholders* dan untuk perlindungan bagi *depositor*
- Kepentingan kredit yang *legitimate* dari *economic agents* harus terpenuhi.

Tujuan dari *review* pelaksanaan *lending* adalah untuk mengevaluasi apakah proses yang ada sudah memenuhi kriteria, yaitu menilai apakah *lending* telah *well-organized*, prosedur internal telah mencerminkan prosedur internal dan manual, staf yang ada menaati kebijakan dan pedoman yang telah ada, dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing pihak dalam proses *lending* tersedia secara tepat waktu, akurat dan menyeluruh.

*Lending process review* yang ada harus terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- Analisa kredit yang detail dan proses persetujuan termasuk di dalamnya sampel formulir aplikasi kredit, formulir ringkasan kredit internal, manual kredit internal, dan dokumen-dokumen kredit
- Kriteria untuk menyetujui kredit, kebijakan dalam menentukan *loan pricing*, dan *lending limits* pada beberapa tingkatan manajemen bank dan tata cara pemberian kredit melalui jaringan kantor cabang bank.
- Kebijakan agunan untuk seluruh tipe kredit dan metode aktual dan prakteknya dalam melakukan penilaian kembali dari agunan dan dokumen yang berhubungan dengan agunan.
- Prosedur administrasi dan *monitoring*, termasuk tanggung jawab, kepatuhan dan kontrol.
- Suatu proses dalam menangani pengecualian (*exception*)

Review yang ada melibatkan *interview* dengan *middle-level managers* dari seluruh departemen yang memiliki fungsi kredit dan juga *review* pada masing-masing dokumen kredit.

*Human resources analysis*, merupakan penilaian pada staf yang terlibat dalam *origination* kredit, *appraisal*, *supervision*, dan proses untuk memonitor risiko kredit. Organisasi staf, *skill*, dan kualifikasinya dianalisa dalam hubungannya dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pada umumnya, frekuensi dan kualitas pelatihan yang diikuti oleh staf merupakan indikator yang baik pada kemampuan *lending* yang baik pula.

*Information flows* merupakan elemen dasar pada proses kredit manajemen, maka ketersediaannya, kualitas dan *cost effectiveness* harus pula dianalisa. Hal ini disebabkan karena informasi yang ada diteruskan pada bagian

yang berbeda-beda pada bank, maka analisis harus memastikan bahwa informasi tersebut tersedia secara menyeluruh, tepat waktu dan *cost effective*. Analisis ini erat kaitannya dengan *review* dari *human resources*, struktur pengendalian dan organisasi, serta teknologi informasi.

### 2.2.3. *Review* pada Kualitas Portfolio Kredit

Suatu portfolio kredit mencerminkan posisi *market* bank dan permintaan yang ada, strategi bisnis dan risikonya, serta kemampuan dalam memberikan kredit. *Review* dari portfolio secara detail adalah sebagai berikut:

- Seluruh pinjaman pada debitur dengan agregat eksposur lebih besar dari 5% dari modal bank.
- Seluruh pinjaman pada pemegang saham dan *connected parties*
- Seluruh pinjaman yang mana bunga ataupun ketentuan pembayaran telah dijadwal ulang semenjak pemberian kreditnya pertama kali.
- Seluruh pinjaman yang pembayaran pokok ataupun bunganya telah lewat lebih dari 30 hari, termasuk pinjaman yang bunganya telah dikapitalisasi atau *di-rolled over*.
- Seluruh pinjaman yang diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet.

Tujuan dari *review* ini adalah untuk menilai kemungkinan pinjaman yang ada akan dapat dibayar kembali serta kesesuaian tentang klasifikasi pinjaman tersebut. Pertimbangan lainnya adalah untuk menilai kecukupan agunan dan kemampuan bisnis debitur dalam menghasilkan *cash*.

Analisa dari agregat *loan portfolio* dan karakteristiknya menggambarkan profil bisnis bank dan prioritasnya, serta tipe risiko kredit yang diharapkan dan mampu diambil oleh suatu bank. Analisis tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Ringkasan dari tipe-tipe kredit yang utama, termasuk didalamnya detail dari jumlah debitur, rata-rata jatuh tempo, dan rata-rata tingkat suku bunga yang diperoleh.

- Distribusi dari loan portfolio, seperti misalnya berdasarkan mata uang, jangka waktu pinjaman, sektor ekonomi atau industri, dan jenis peminjam (swasta, pemerintah, korporasi, atau retail)
- Pinjaman kepada pemerintah dan garansi lainnya
- Pinjaman berdasarkan klasifikasi pinjaman
- *Non performing loan*

### 2.3. Non Performing Loan Portfolio

Konsep *non performing loan* biasanya diperkenalkan sebagai bagian dari diskusi klasifikasi aset. *Non performing assets* adalah aset yang sudah tidak lagi menghasilkan *income* bagi bank. Pinjaman dikategorikan sebagai *nonperforming* bila pokok dan bunganya telah jatuh tempo dan tidak terbayarkan hingga lebih dari 90 hari (jangka waktu ini dapat berbeda-beda pada tiap yuridiksi).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, yang dinamakan *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit bermasalah terhadap total kredit, yang mana kredit tersebut merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Penjelasan mengenai kategori kualitas kredit tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif. PBI tersebut antara lain mengharuskan bank menyesuaikan sejumlah hal terkait dengan NPL, yaitu kategori kurang lancar diberikan kepada debitor yang menunggak antara 90-120 hari (sebelumnya 90-180 hari); kategori diragukan, apabila tunggakan antara 120-180 hari (sebelumnya 180-270 hari); dan macet apabila tunggakan lebih 180 hari (sebelumnya lebih 270 hari).

Identifikasi *non performing loan portfolio* untuk kepentingan pelaporan laporan keuangan, dilakukan berdasarkan *principal balance outstanding*, dan bukannya pembayaran yang tertunggak. *Non performing loan portfolio* merupakan indikasi dari kualitas total portfolio dan juga menggambarkan

keputusan *lending* dari suatu bank. Rasio *collection* dari bank juga dapat menggambarkan kualitas portfolio dan juga keputusan *lending* tersebut.

Ketika melakukan penilaian dalam *non performing loan*, jumlah total *provison* mengindikasikan kapasitas dari bank untuk mengakomodasi risiko secara efektif. Analisa dari *non performing portfolio* setidaknya mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- *Aging of past due loans*, termasuk pokok dan bunga, yang telah jatuh tempo lebih dari 30, 90, 180, dan 360 hari. Klasifikasi ini dapat diperinci berdasarkan jenis debitur, dan aktivitas ekonomi kantor cabang, untuk menentukan *trend* keseluruhan dan apakah seluruh debitur terpengaruh secara seragam.
- Alasan untuk kualitas portfolio kredit yang memburuk, yang dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan penghitungan yang dapat diambil oleh bank untuk melakukan *reserve* pada *trend* yang ada.
- Suatu daftar *non performing loan*, termasuk detail yang relevan, yang harus dinilai berdasarkan *case-by-case*, untuk melihat apakah yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kapasitas pembayaran kembali dan untuk melihat apakah perencanaan *collection* telah dilakukan.
- Tingkat *provison* harus dipertimbangkan untuk menentukan kapasitas bank dalam bertahan ketika suatu pinjaman tersebut macet.
- Akibat kepada *profit and loss account* harus dipertimbangkan untuk menentukan secara pasti bagaimana bank akan terpengaruh dengan memburuknya kualitas aset.

Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan memburuknya kualitas portfolio. Hal yang tidak dapat terelakkan adalah ketika bank membuat kesalahan dalam penilaiannya. Pada sebagian besar kasus bank yang gagal, penyebab utamanya adalah *systemic in nature* dan berakar pada *bank's credit culture*.

## 2.4. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit

Manajemen risiko kredit secara spesifik memperhitungkan tiga macam kebijakan. Kebijakan pertama adalah membatasi atau mengurangi risiko kredit, seperti misalnya kebijakan konsentrasi dan eksposur dalam jumlah besar, diversifikasi yang baik, pinjaman pada pihak terkait, atau *over-exposure*. Kebijakan kedua adalah klasifikasi aset, dan yang ketiga adalah kebijakan *loss provisioning*.

Penilaian pada fungsi manajemen risiko kredit ini harus mempertimbangkan pinjaman, dan juga pemberian kredit lainnya (*on- dan off-balance-sheet*) agar terpenuhinya faktor-faktor seperti di bawah ini:

- Tingkat, distribusi, dan kompleksitas dari klasifikasi aset
- Tingkat dan komposisi dari *nonaccruing, nonperforming, renegotiated, rolled-over* dan *reduced-rate assets*
- Kecukupan valuasi *reserve*
- Kemampuan manajemen untuk mengelola dan melakukan penagihan pada aset yang bermasalah
- Konsentrasi kredit
- Kemampuan dan efektivitas dari kebijakan kredit dan prosedur pengelolaan kredit
- Kemampuan dan efektifitas dari proses bank untuk mengidentifikasi dan memonitor perubahan tingkat risiko atau risiko yang memiliki asosiasi dengan eksposur kredit yang telah disetujui.

Tingkat kewenangan dalam persetujuan kredit yang jelas akan membantu suatu keputusan tersebut dibuat dengan hati-hati dan dibuat berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Suatu institusi harus memiliki prosedur untuk mengatur *collection* dari pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang sesuai dengan perjanjian, serta harus memiliki mekanisme tertentu untuk menangani bila terjadinya suatu *nonperforming loan*.

### 2.4.1. Kebijakan untuk Membatasi atau Mengurangi Risiko Kredit

Regulator bank telah menaruh perhatian pada konsentrasi risiko oleh bank. Tujuan regulator dalam hal ini adalah mencegah bank untuk memberikan

kredit dalam jumlah yang besar pada debitur tertentu atau suatu grup usaha tertentu. Untuk itu, sistem perbankan modern saat ini memiliki ketentuan bahwa bank tidak boleh memberikan pinjaman atau bentuk kredit yang lainnya, melebihi jumlah tertentu dari modalnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah pinjaman kepada pihak terkait, yaitu perusahaan induk, *shareholder*, anak perusahaan, perusahaan afiliasi, dewan direksi, atau pejabat eksekutif lainnya. Pemberian kredit pada pihak terkait ini dipandang cukup berbahaya dalam eksposur risiko kredit karena keputusan pemberian kredit dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, dan perlu sangat diperhatikan dalam kepatuhannya dengan prosedur internal yang berlaku. Untuk itu, dalam sistem perbankan yang *prudent*, pinjaman kepada pihak terkait sangat dibatasi jumlahnya dan perlu mendapat persetujuan dari dewan direksi atau komisaris.

#### 2.4.2. Klasifikasi Aset

Klasifikasi aset ini adalah suatu proses dimana aset diberikan suatu tingkatan risiko kredit, yang diindikasikan oleh kemungkinan akan kewajiban hutang tersebut akan dipenuhi dan hutang akan dilikuidasi berdasarkan ketentuan dalam perjanjian. Secara umum, seluruh aset di mana bank memiliki risiko di dalamnya, harus diklasifikasi, seperti misalnya *loans and advances*, *accounts receivables*, investasi, *equity participation*, dan *contingent liabilities*.

Klasifikasi aset merupakan alat kunci dalam manajemen risiko. Bank melakukan klasifikasi aset sendiri, namun tetap mengacu pada standar yang biasanya ditetapkan oleh pengawas bank. Peraturan dalam penetapan klasifikasi tersebut biasanya menitikberatkan pada kemampuan dan keinginan debitur untuk membayar kewajibannya, baik itu pokok dan bunganya, dari *operation cash flow* yang ada.

#### 2.4.3. Kebijakan *Loan Provisioning*

Klasifikasi aset membantu dasar penentuan dari level yang sesuai untuk melakukan *provisioning* untuk kemungkinan *loan losses*. *Provision* tersebut bersama-sama dengan *general loss reserves* biasanya diperhitungkan dalam *tier 2*

*capital*, membentuk dasar bagi kemampuan bank untuk menyerap kerugian yang ada. Untuk menentukan *reserve* yang cukup, seluruh faktor signifikan yang mempengaruhi kolektibilitas dari porfolio kredit harus dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kualitas dari kebijakan dan prosedur kredit, pengalaman *loss* sebelumnya, praktek *recovery* dan *loan collection*, perubahan dalam ekonomi lokal dan nasional, kondisi bisnis, serta tren ekonomi secara keseluruhan. Penilaian dari nilai aset harus dilakukan secara sistematis dan konsisten dari waktu ke waktu serta didukung oleh dokumentasi yang baik.

Kebijakan dalam *loan-loss provisioning* dapat berbeda-beda, bisa berupa ketentuan maupun kebijakan masing-masing bank, tergantung dengan sistem perbankan yang ada. Penentuan dari tingkat *provisioning* tertentu biasanya ditentukan oleh nilai statistik tertentu.

Dua pendekatan yang dapat dilakukan ketika berhubungan dengan *loss asset*. Pertama adalah, mempertahankan *loss assets* dalam buku bank, hingga seluruh kegiatan penyelamatan untuk *collection* sudah tidak dapat dilakukan lagi. Hal ini biasanya terjadi pada sistem perbankan yang mengacu pada sistem British, yang mana tingkat *loan loss reserve* dapat menjadi lebih tinggi. Pendekatan kedua biasanya dilakukan pada sistem perbankan yang menganut sistem U.S., yang mana seluruh *loss assets* segera dihapus bukukan terhadap *reserve*. Hal ini menyebabkan tingkat *reserve* akan menjadi lebih kecil dalam hubungannya dengan *outstanding loan portfolio*.

## 2.5. Kinerja Bank berdasarkan *Profit* dan *Earnings*

Seperti halnya bisnis lainnya, bank memiliki risiko dan tingkat pengembalian yang melekat dalam bisnisnya, namun demikian bank berbeda dibandingkan dengan bisnis pada umumnya, terutama dalam menghasilkan pendapatan atau keuntungan (*profit and earnings*). Untuk lebih memahami bagaimana bank menghasilkan keuntungan, maka perlu diketahui risiko apa saja yang terdapat dalam bisnis bank dan bagaimana *leverage structure* dari suatu bank. Kedua hal ini merupakan kunci kesuksesan dalam penentu tingkat keuntungan dalam bisnis bank yang pada akhirnya akan menunjukkan tingkat kinerja dari suatu bank tersebut.

Karena karakteristik bisnis bank yang unik tersebut, maka bisnis bank merupakan bisnis dengan tingkat risiko yang khusus pula. Untuk itu, perlu dikenali empat sumber dari *revenue* suatu bank dan kemudian akan dibahas secara garis besar. *Revenue* dari suatu bank dapat berasal dari:

- *Interest income*
- *Fees* dan komisi
- *Income from associates*
- *Trading income, especially from foreign exchange.*

Pada bank komersial umumnya, *interest income* biasanya merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. *Interest income* ini dapat berasal dari *holding bonds* dan *marketable securities* lainnya, namun sebagian besar berasal dari *interest* yang dihasilkan dari pinjaman/ *loans*. Setelah *interest* dari *loans* tersebut dikurangkan dengan *cost* untuk pembayaran deposito kepada para depositor (*interest expense*) dan dana pinjaman lainnya seperti dana dari pinjaman *interbank*, maka bank akan memperoleh *net interest income*. Fluktuasi pada *net interest income* suatu bank merupakan cerminan risiko yang harus diambil oleh manajemen bank, yaitu antara lain risiko kredit, risiko investasi, dan risiko likuiditas.

Pada kondisi saat ini, banyak bank yang lebih mengandalkan *revenue*-nya dari *fee* dan komisi dengan mempekerjakan orang-orang profesional dengan kemampuan yang memadai (*high skilled professionals*). Hal ini disebabkan, *revenue* jenis ini lebih cenderung untuk tidak sensitif terhadap pergerakan *interest rate*. Terlebih lagi, terdapat suatu fakta yang menyatakan bahwa bank yang mengandalkan *revenue*-nya dari *fee* dan komisi dapat memiliki *return on capital* yang lebih baik, karena tidak diperlukan *owner's equity* dalam jumlah besar untuk men-support tenaga profesionalnya tersebut. *Revenue* tersebut antara lain dapat berasal dari transaksi seperti:

- *Letters of Credit issued* atau *confirmed*
- *Underwriting commissions*
- *Selling commissions on securities sold to investors*

Pendapatan bank lainnya dapat berasal dari *income from associates*. Pendapatan jenis ini relatif umum terdapat pada bank-bank di Eropa dan Asia,

namun jarang terjadi pada bank-bank di Amerika. Hal ini disebabkan karena adanya larangan dalam perbankan di Amerika untuk melakukan *crossing state boundaries* dan melakukan investasi pada anak perusahaan non bank.

Selanjutnya, jenis pendapatan bank lainnya adalah *trading income*. Pendapatan jenis ini sebagian besar berasal dari *foreign exchange trading*, yang termasuk di dalamnya pendapatan dari perdagangan *bonds*, *certificate of deposits*, *Treasury bills* dan *marketable securities* lainnya.

Setelah uraian mengenai sumber dari pendapat bank seperti di atas, maka perlu dikenali lebih jauh mengenai risiko-risiko yang perlu mendapat perhatian ekstra. Risiko pertama adalah adanya kerugian karena inefisiensi, *interest penalties*, dan kompensasi untuk kesalahan. Risiko kedua adalah risiko karena adanya *fraud*, dan ketiga adalah risiko *fiduciary*, yang mungkin timbul karena ketidaksesuaian dalam melakukan *discharge of fiduciary responsibilities*.

*Earnings* dari suatu bank perlu untuk dianalisa secara lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana suatu bank memperolehnya. Untuk itu, terdapat rasio-rasio utama yang perlu diperhatikan. Penentu utama dalam menghitung profitabilitas dari suatu bank adalah *return on assets (net income/ average total assets)*, yang dikombinasikan dengan tingkat *leverage*, menghasilkan *return on equity (net income/ capital funds)*. Rasio ini juga merupakan rasio yang umum digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan selain bank.

## 2.6. Penelitian yang Pernah Dilakukan

Peranan dewan komisaris dalam pelaksanaan *corporate governance* yang efektif telah menjadi sesuatu yang penting bagi bank dan regulator yang mengatur, terutama setelah berlangsungnya krisis keuangan di Asia pada tahun 1997. Banyak studi yang dilakukan untuk meneliti dan menganalisa mengenai pengaruh dewan komisaris pada pelaksanaan *corporate governance* tersebut dan peranan komite yang dibentuknya, khususnya komite audit.

Pada perusahaan terbatas yang menganut sistem organ perusahaan dengan "two-tier" board system seperti halnya di Indonesia, peran pengawasan perusahaan secara umum dilakukan oleh dewan komisaris, sedangkan pada perusahaan penganut sistem "one-tier" board system, maka fungsi pengawasan

dilaksanakan oleh organ yang disebut sebagai *boards of directors*, seperti telah diuraikan di atas.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai pentingnya *corporate governance*, khususnya dilakukan dengan studi kasus di negara lain, digunakan istilah *boards of directors* untuk menggambarkan fungsi pengawasannya. Seperti misalnya salah satu penelitian yang dijadikan acuan untuk penelitian ini, yaitu oleh Pathan (2007), yang meneliti ukuran dan independensi *board of directors*, beserta pengaruhnya pada kinerja perusahaan, yaitu pada bank-bank di Thailand. Thailand dapat dijadikan area penelitian yang cukup baik, mengingat seperti halnya Indonesia, pada tahun 1997 negara tersebut juga mengalami krisis keuangan yang cukup parah.

Pada penelitian yang menggunakan model *panel fixed effect* tersebut, diketahui bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara ukuran *board* pada bank di Thailand dengan kinerjanya. Hal ini konsisten dengan apa yang diharapkan pada hipotesis yang dibuat. Hasil ini menunjukkan bahwa *board* dengan ukuran yang lebih kecil, akan lebih efektif dalam memonitor manajer bank, sedangkan *board* dengan ukuran yang lebih besar rentan untuk terkena *agency problem* dan juga "*free-riding*" problems.

Hasil kedua yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah ditemukannya hubungan statistik yang positif antara independensi *board* pada bank di Thailand dengan kinerja bank. Hal ini menunjukkan bahwa *independent directors* lebih baik dalam melakukan monitor pada bank (khususnya di Thailand), karena *independent directors* juga memiliki *market reputation* yang perlu dijaga. Penemuan-penemuan pada penelitian tersebut menyarankan bahwa bank dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara mengurangi jumlah atau ukuran *board* dan menambahkan beberapa lagi *independent directors*.

Pada penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya, juga telah berhasil didokumentasikan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas *boards*. Faktor-faktor tersebut adalah bahwa keanekaragaman *board* (kombinasi *insiders* dibandingkan *outsiders*), *chief executive officer* (CEO), dan dualitas *chairman*, umur CEO, kompensasi CEO dan tingkat pendidikan *directors*

serta perkumpulan/ latar belakang dunia profesionalnya, seluruhnya memiliki kontribusi pada efektivitas boards (Victor and Peter, 2004).

Sebagai tambahan, beberapa penelitian empiris lainnya menunjukkan bahwa ukuran *boards* dan kinerjanya adalah berhubungan negatif (Eisenberg, Sundgren and Wells, 1998). Studi lainnya yang juga menemukan terdapatnya hubungan negatif antara ukuran dewan dengan kinerjanya (Hermalin and Weisbach, 2003) yang menunjukkan bahwa dewan dengan ukuran yang lebih kecil akan lebih efektif dan dapat memberikan nilai tambah karena lebih mudah untuk melakukan koordinasi di dalamnya.

Namun, Kiel dan Nicholson (2003) menemukan suatu hubungan statistik yang positif antara ukuran *corporate board* dan kinerja perusahaan di antara perusahaan-perusahaan Australia yang besar. Ukuran dewan yang lebih besar akan memungkinkan terjadinya kesempatan yang lebih besar pula bagi untuk melakukan *networking* dan adanya tambahan anggota yang memiliki keahlian, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kinerja bank yang lebih baik.

Senada dengan hal ini, untuk perusahaan *US bank holding companies*, ditemukan bahwa ukuran *board* dan kinerjanya memiliki hubungan positif (Adams and Mehran, 2003; Belkhir, 2005). Penelitian ini menyarankan bahwa pengewasan yang dilakukan oleh *board* dengan jumlah anggota yang besar akan memiliki keuntungan yang akan melebihi biaya yang timbul karenanya. Hubungan positif antara ukuran *board* dengan kinerja pada perusahaan-perusahaan di Amerika tersebut lebih jauh dapat dijelaskan karena adanya *merger* dan akuisisi pada industri perbankan di Amerika.

Dari segi tingkat independensi *board* dari suatu bank, ditemukan berbagai macam hasil penelitian secara empiris yang menyatakan hubungannya dengan tingkat kinerja bank. Meskipun demikian, banyaknya perubahan di beberapa negara yang menginginkan adanya penambahan anggota independen pada dewan, mempengaruhi pendapat regulator bahwa dengan semakin banyaknya anggota independen akan semakin memperbaiki fungsi monitor yang ada.

Hal ini didukung oleh penelitian oleh Fama & Jensen (1983) yang menjelaskan bahwa *independent director* akan memiliki insentif untuk melakukan perlindungan terhadap pemegang sahamnya karena mereka ingin mempertahankan reputasi baik mereka di pasar. Namun beberapa penelitian lain menemukan tidak adanya hubungan, bahkan hubungan yang negatif antara independensi *board* dengan kinerja perusahaan (Kiel & Nicholson, 2003) .

Kemudian terdapat tulisan lainnya yang menjelaskan penelitian terhadap hubungan antara banyaknya *meeting* yang dilakukan *board* terhadap kinerja perusahaan, seperti yang dilakukan oleh Brick & Chidambaram (2007). Hasil yang diperoleh mengindikasikan dengan adanya peningkatan pada pengawasan dari *board*, akan meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya berimbas pada kinerja perusahaan.

Dengan demikian, cukup menarik untuk meneliti secara empiris apakah bank-bank di Indonesia dengan karakteristik dewan komisaris yang dimilikinya, akan memiliki kontrol dan pengaruh yang lebih baik terhadap tingginya kinerja bank, yang dalam hal ini akan dilihat dari rasio *return on equity* (ROE) dan dari segi pelepasan kredit yang dicerminkan dari rasio *non performing loan* (NPL) yang ada.

## BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

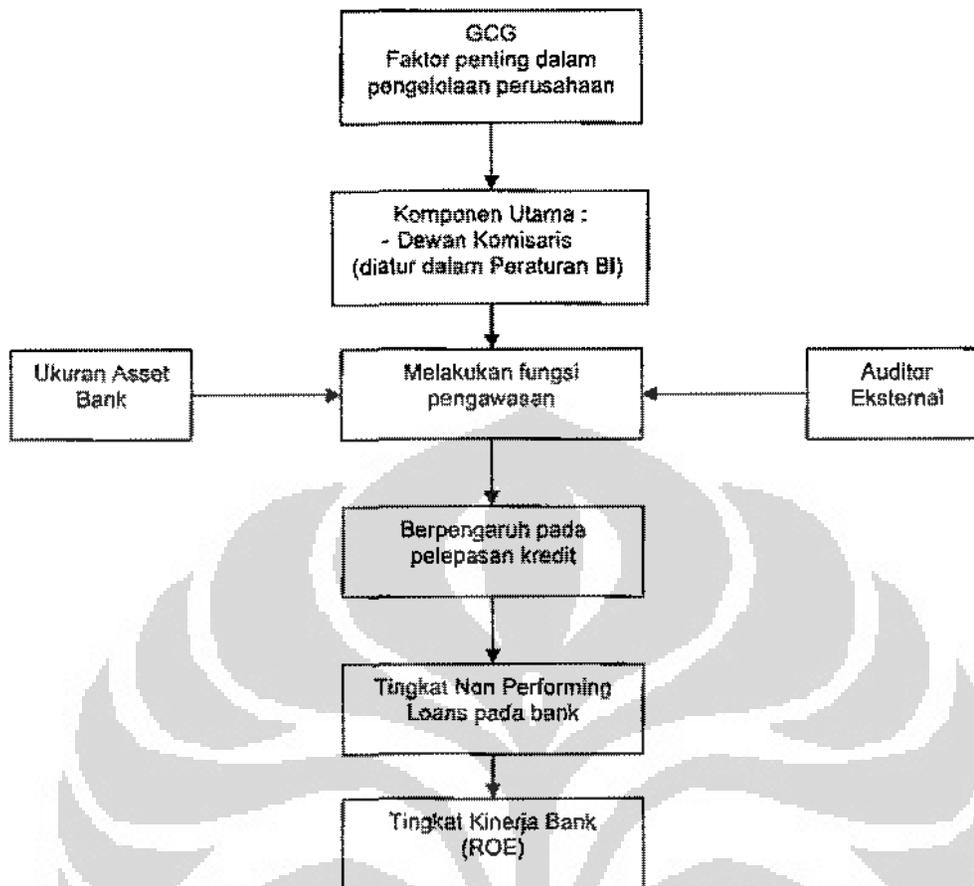
### 3.1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian literatur mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), risiko kredit beserta kualitas kredit yang dimiliki (tercermin dengan adanya *non performing loan*), serta tingkat kinerja bank yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka disusunlah kerangka dasar pemikiran sebagai berikut:

- GCG merupakan faktor penting dalam pengelolaan perusahaan, terutama dalam industri perbankan, dimana bentuk dari industri ini berbasis pada kepercayaan nasabah terhadap institusi keuangan tersebut.
- Mekanisme *corporate governance* yang baik dapat mempengaruhi pengawasan pada kualitas kredit yang dilepaskan oleh perbankan. Kualitas kredit tersebut dicerminkan pada rasio *non performing loan* (NPL) yang dimiliki suatu bank. Tingkat NPL yang dimiliki oleh suatu bank ini tentu akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja suatu bank. Tingkat kinerja bank tersebut dicerminkan dari rasio ROE yang dihasilkan.
- NPL yang digunakan dalam penelitian ini adalah NPL *nett*, yaitu NPL sesudah dikurangi oleh *loan loss provision*.
- Dalam pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia, struktur organisasi perusahaan, terutama dari sisi perusahaan, adalah terdiri dari dewan komisaris (*board of commissioners*) dengan dibantu oleh komite-komite yang akan mendukung kinerja komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite-komite yang penting dalam membantu kinerja dewan komisaris dalam suatu perusahaan, khususnya bank, yaitu komite audit, komite *monitoring* risiko, serta komite kompensasi dan komite nominasi.

- Karakteristik dewan komisaris yang akan diteliti adalah jumlah total anggota, proporsi komisaris independen yang dimiliki, dan banyaknya rapat atau pertemuan dewan komisaris yang dilakukan dalam setahun.
- Berdasarkan data historis karakteristik dewan komisaris bank-bank komersial tahun 2006-2007 di Indonesia, akan dilakukan analisa regresi dengan *software* SPSS dan atau E-Views sehingga diketahui model persamaan antara NPL dan juga ROE terhadap karakteristik dewan komisaris, beserta faktor lain yang mempengaruhi, yaitu auditor eksternal dan juga ukuran bank.
- Dari hasil regresi tersebut, dapat diketahui apakah bank dengan dewan komisaris yang lebih besar, independen dan lebih aktif, akan lebih dapat menjalankan fungsi pengawasannya, sehingga kredit yang dilepaskan oleh bank akan memiliki kualitas yang lebih baik dan pada akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kinerja dari suatu bank.

Kerangka pemikiran tersebut bila digambarkan dalam bagan, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Sumber: Diolah oleh penulis

**Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran**

Bab metodologi penelitian ini akan membahas mengenai perincian data yang digunakan, pengolahan dan pengujian data serta cara menganalisis data *non performing loans*, tingkat kinerja bank, beserta variabel lainnya. Bab ini akan menguraikan tahapan dalam menganalisa pengaruh karakteristik dewan komisaris dalam menjelaskan tingginya tingkat *non performing loans* dan kinerja yang dimiliki bank.

Pembahasan mengenai sampel meliputi penentuan sampel yang digunakan, periode waktu pengamatan sampel, teknis pengumpulan data dan sumber data yang dijadikan acuan. Definisi operasional variabel membahas definisi dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel yang

didefinisikan meliputi variabel bebas (*non performing loans* dari bank-bank komersial dan juga tingkat kinerja bank) dan variabel tidak bebas karakteristik dewan komisaris).

Hipotesis yang diuji dan model yang digunakan akan dibahas sehingga penelitian menjadi lebih terarah dalam pengambilan kesimpulan. Bagian akhir dari bab ini akan membahas teknik pengolahan data menjadi model dan uji-uji terhadap asumsi suatu model yang dilakukan agar model yang dihasilkan tidak bias.

### 3.2. Hipotesis Penelitian

Seperti telah dikemukakan pada bab awal penelitian ini dan mengacu pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Bank yang memiliki *board of commissioner* yang melakukan *meeting* lebih sering akan memiliki tingkat ROE yang semakin tinggi.
- H<sub>2</sub> : Bank yang memiliki *board of commissioner* dengan jumlah anggota yang lebih besar akan memiliki tingkat ROE yang semakin tinggi.
- H<sub>3</sub> : Bank yang memiliki *board of commissioner* dengan jumlah komisaris independen yang lebih banyak, akan memiliki tingkat ROE yang semakin tinggi.
- H<sub>4</sub> : Bank yang memiliki *board of commissioner* yang melakukan *meeting* lebih sering akan memiliki *non performing loan* yang lebih kecil.
- H<sub>5</sub> : Bank yang memiliki *board of commissioner* dengan jumlah anggota yang lebih besar akan memiliki *non performing loan* yang lebih kecil.
- H<sub>6</sub> : Bank yang memiliki *board of commissioner* dengan jumlah komisaris independen yang lebih banyak, akan memiliki *non performing loan* yang lebih kecil.

### 3.3. Model Penelitian

Guna mengetahui pengaruh karakteristik dewan komisaris secara keseluruhan terhadap kinerja bank yang dinyatakan dengan ROE, maka digunakan Persamaan 1 sebagai berikut:

$$ROE_{it} = \beta_0 + \beta_1 JBOC_{it} + \beta_2 MBOC_{it} + \beta_3 IBOC_{it} + \beta_4 BIG4_{it} + \beta_5 LnASET_{it} + \beta_6 NPLN_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- ROE : rasio *return on equity*  
 JBOC : jumlah anggota dewan komisaris  
 MBOC : jumlah total pertemuan / *meeting* dewan komisaris dalam setahun  
 IBOC : proporsi anggota dewan komisaris yang merupakan komisaris independen.  
 BIG4 : 1 jika auditor eksternal termasuk dalam Big 4 dan 0 jika sebaliknya  
 LnASET : log normal dari besarnya *assets* (aktiva) yang dimiliki bank  
 NPLN : *non performing loan* yang dinyatakan secara *nett*  
 $\varepsilon_{it}$  : *Error term* dalam model

Hipotesis yang ada memprediksi bahwa bank dengan mekanisme dewan komisaris yang lebih baik (ukuran, jumlah pertemuan dan independensi) diasosiasikan dengan pengawasan yang lebih baik, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kinerja bank menjadi lebih baik. Sehingga, diharapkan koefisien dari variable dewan komisaris (JBOC, MBOC dan IBOC) menjadi *significantly positive* terhadap ROE pada bank komersial.

Terdapat beberapa variable yang merupakan variabel kontrol. Pada Persamaan 1 ini akan digunakan ukuran bank yang ditunjukkan dengan asset yang dimiliki, pemilihan auditor eksternal oleh bank serta besarnya tingkat NPL dari suatu bank. Adapun keempat auditor eksternal yang termasuk ke dalam Big 4 tersebut antara lain adalah PriceWaterhouse Coopers, Ernst & Young, Deloitte, dan KPMG.

Setelah diketahui pengaruh dan hubungan antara karakteristik dewan komisaris tersebut terhadap kinerja bank secara keseluruhan, maka perlu pula diketahui hubungan antara tingkat NPL yang dimiliki bank, dengan faktor-faktor GCG yang utama, yaitu karakteristik dewan komisaris.

Perlunya diketahui hubungan antara karakteristik dewan komisaris dengan NPL ini disebabkan karena NPL merupakan salah satu faktor utama dalam penentu tingkat kinerja bank. Hal ini juga didukung oleh faktor fungsi utama bank sebagai mediator dan penggerak roda perekonomian, yaitu dengan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pelepasan kreditnya. Oleh sebab itu, pengaruh dan hubungan antara karakteristik dewan komisaris terhadap tingkat NPL bank ini menjadi suatu kondisi yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Untuk itu, digunakan model seperti yang ditunjukkan pada Persamaan 2 berikut:

$$NPLN_{it} = \beta_0 + \beta_1 JBOC_{it} + \beta_2 MBOC_{it} + \beta_3 IBOC_{it} + \beta_4 BIG4_{it} + \beta_5 LnASET_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- NPLN : *non performing loan* yang dinyatakan secara nett  
 JBOC : jumlah anggota dewan komisaris  
 MBOC : jumlah total pertemuan / *meeting* dewan komisaris dalam setahun  
 IBOC : proporsi anggota dewan komisaris yang merupakan komisaris independen.  
 BIG4 : 1 jika auditor eksternal termasuk dalam Big 4 dan 0 jika sebaliknya  
 LnASET : log normal dari besarnya *assets* (aktiva) yang dimiliki bank  
 $\varepsilon_{it}$  : *Error term* dalam model

Hipotesis yang ada memprediksi bahwa bank dengan mekanisme dewan komisaris yang lebih baik (ukuran, jumlah pertemuan dan independensi) diasosiasikan dengan pengawasan yang lebih baik, khususnya pada kredit yang dilepaskan, yang kemudian dapat dicerminkan dari *non performing loan* yang lebih kecil. Sehingga, diharapkan koefisien dari variable dewan komisaris (JBOC,

MBOC dan IBOC) menjadi *significantly negative* terhadap NPL pada bank komersial.

Pada Persamaan 2 ini akan digunakan ukuran bank yang ditunjukkan dengan asset yang dimiliki, dan pemilihan auditor eksternal oleh bank. Adapun keempat eksternal auditor yang termasuk ke dalam Big 4 tersebut masih dalam kategori yang sama, yaitu antara lain adalah PriceWaterhouse Coopers, Ernst & Young, Deloitte, dan KPMG.

### 3.4. Operasionalisasi Variabel

Penjelasan tentang variabel-variabel dan alasan penggunaannya dalam persamaan tersebut di atas antara lain adalah:

- *Non performing loan ratio* merupakan rasio kredit bermasalah dibandingkan dengan total jumlah kredit yang dilepaskan oleh bank. NPL ini dinyatakan secara net, yaitu setelah dikurangi dengan *loan loss provision*. Nilai NPL yang digunakan adalah pada tahun 2006-2007. NPL secara nett ini digunakan karena telah dianggap mewakili kerugian bank secara total akibat adanya kondisi kredit bermasalah tersebut.
- *Return on equity* merupakan rasio yang diperoleh dengan membandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh dengan jumlah harta neto pemegang saham (modal disetor, laba ditahan dan laba/ rugi berjalan). ROE merupakan tolok ukur profitabilitas yang paling penting bagi pemegang saham. Berdasarkan aturan dari Bank Indonesia, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, perhitungan ROE diperoleh dari laba setelah pajak, dibagi dengan rata-rata *equity*. Rata-rata *equity* merupakan rata-rata modal inti (*tier 1*). Perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.
- Ukuran besarnya dewan komisaris dan banyaknya pertemuan yang dilakukan menggambarkan aktivitas dewan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya
- Proporsi komisaris independen menggambarkan tingkat independensi suatu dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu bank.

- Diteliti juga pengaruh pemilihan auditor eksternal oleh bank tersebut. Auditor eksternal yang termasuk di dalam Big 4 auditor, akan dinyatakan dalam variabel *dummy* 1 (satu), sedangkan yang tidak termasuk, akan dinyatakan dengan angka 0 (nol).
- Ukuran *assets* yang digunakan untuk menunjukkan ukuran besarnya bank, digunakan nilai *assets* (aktiva) yang dimiliki bank.

### 3.5. Populasi dan Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah rasio *non performing loan* dan rasio *return on equity* bank pada tahun 2006-2007, baik itu bank yang telah terdaftar dalam bursa, maupun yang tidak. Sedangkan data sampel untuk variabel bebas yaitu karakteristik dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- Jumlah anggota dewan komisaris, yaitu jumlah orang dalam keanggotaan dewan komisaris suatu bank, termasuk presiden komisaris, komisaris, dan didalamnya yang termasuk komisaris independen.
- Jumlah pertemuan dewan komisaris, yaitu banyaknya *meeting*/ pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun buku, yaitu tahun 2006-2007, untuk membahas seluruh tanggung jawab dan wewenang guna menjalankan fungsinya dengan baik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan tahunan (*annual report*) bank-bank yang dapat diperoleh dari *website* resminya ataupun dari *website* Bursa Efek Indonesia. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- Data dewan komisaris yang diperoleh dari laporan tahunan bank-bank di Indonesia tahun 2006-2007.
- Data *non performing loans* yang digunakan dalam model penelitian dan variabel kontrolnya berasal dari laporan keuangan masing-masing bank tersebut pada tahun 2006-2007.
- Data *return on equity* diperoleh dari *website* bank Indonesia mengenai publikasi laporan keuangan bank-bank di Indonesia tahun 2006-2007.

### 3.6. Uji Statistik

Permodelan yang digunakan dalam penelitian ini adalah permodelan dalam bentuk multi regresi (regresi berganda), dengan melakukan pengujian-pengujian terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam model tersebut. Pengujian terhadap asumsi-asumsi data yang ada terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji signifikansi model. Setelah dilakukan pengujian terhadap data yang ada, maka pengolahan data tersebut akan dilakukan menggunakan *software* E-Views dan atau SPSS. Berikut dijelaskan teknik pengolahan data dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

#### 3.6.1. Model Regresi Berganda

Pada Persamaan 1, digunakan variabel bebas yang sama dengan Persamaan 1, besaran ROE akan dipengaruhi oleh karakteristik dewan komisaris yang dimiliki bank. Karakteristik yang akan diteliti meliputi banyaknya anggota dewan komisaris, frekuensi pertemuan yang dilakukan, serta proporsi komisaris independen yang dimiliki oleh suatu dewan komisaris. Variabel lain yang diteliti adalah pemilihan auditor eksternal oleh bank dan besarnya aset bank serta tingkat NPL net. Dalam Persamaan 1 tersebut, ROE merupakan variabel terikat (*dependent variable*) sedangkan karakteristik dewan komisaris yang telah dijelaskan tadi, auditor eksternal yang digunakan, besarnya aset yang dimiliki bank, serta tingkat NPL yang dimiliki merupakan variabel bebas (*independent variable*).

Kemudian, pada Persamaan 2, NPL dijadikan sebagai variabel terikat. *Non Performing Loans (NPL)* yang digunakan dalam model persamaan adalah NPL yang merupakan NPL secara nett. Pada Persamaan 2 tersebut di atas, besaran NPL akan dipengaruhi oleh karakteristik dewan komisaris yang dimiliki bank. Variabel kontrol lain yang diteliti adalah pemilihan auditor eksternal oleh bank dan besarnya aset bank. Dalam Persamaan 2, NPL merupakan variabel terikat (*dependent variable*) sedangkan karakteristik dewan komisaris yang telah dijelaskan tadi, auditor eksternal yang digunakan dan besarnya aset yang dimiliki bank merupakan variabel bebas (*independent variable*).

Model regresi berganda dapat digunakan sebagai metode untuk menganalisis hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Model regresi berganda mempunyai beberapa asumsi yang masih sama dengan model *simple linear regressing*, dengan tambahan dua asumsi baru. Keseluruhan asumsi yang digunakan dalam model linear berganda ini adalah:

- a. *Error terms* dalam model, yaitu  $\epsilon_i$  merupakan variabel acak yang terdistribusi secara normal
- b. Variance pada nilai Y adalah sama pada seluruh nilai X, yang mana asumsi ini mengacu pada *homoscedasticity*.
- c. *Error terms* adalah independen antara satu dan yang lainnya. Bila suatu *error terms* tidak independen, maka akan terjadi yang dinamakan autokorelasi.
- d. Asumsi dari *linearity*, yang mana persamaan yang ada berada pada garis lurus.
- e. Jumlah pengamatan/observasi,  $n$ , lebih banyak dari jumlah independen variabel,  $k$ , setidaknya lebih banyak sebesar 2 data.
- f. Variabel bebas tidak saling berhubungan secara linear atau tidak ada multikolinearitas. Multikolinearitas terjadi bila dua atau lebih variabel independen berhubungan secara liner.

Tahapan penyusunan model regresi dan analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan variabel bebas dan variabel terikat
2. Penyusunan model regresi
3. Pengujian multikolinearitas dan autokorelasi
4. Pengujian signifikansi model
5. Penafsiran/ analisis model regresi berganda.

### 3.6.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Webster (1998) dilakukan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak memiliki masalah multikolinearitas. Multikolinearitas ini akan timbul jika terdapat korelasi antar variabel bebas dalam persamaan tersebut. Hal tersebut akan bahkan dapat menyebabkan tanda koefisien berlawanan dengan logika yang seharusnya.

Analisis multikolinearitas yang dilakukan adalah dengan mendeteksinya dengan membuat matrik korelasi untuk setiap variabel bebas pada model. Ukuran dari ada tidaknya suatu korelasi adalah dengan menggunakan t-test (Z test untuk sampel yang berjumlah di atas 30). Hipotesis yang diuji adalah:

$$H_0 : \rho_{12} = 0 \quad (\text{terdapat multikolinearitas})$$

$$H_A : \rho_{12} \neq 0 \quad (\text{tidak terdapat multikolinearitas})$$

$\rho_{12}$  adalah koefisien korelasi antara variable bebas 1 dan 2.

$$t = \frac{r_{12}}{S_r}$$

Dimana  $r_{12}$  adalah korelasi sampel untuk variable bebas 1 dan 2, serta

$$S_r = \sqrt{\frac{1 - r_{12}^2}{n - 2}}$$

$H_0$  diterima jika  $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  dan ditolak jika di luar itu.

Cara lain untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF). VIF berasosiasi dengan variable bebas yang dilakukan regresi terhadapnya pada variable bebas lainnya. Hasilnya yang berupa  $R^2$  lalu digunakan untuk mengkalkulasi VIF untuk variabel tersebut. Nilai VIF untuk variabel bebas tersebut mewakili pengaruh variabel tersebut pada multikolinearitas. Adapun nilai VIF dinyatakan dalam:

$$VIF(X_i) = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

### 3.6.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat mengakibatkan hasil yang diperoleh mengalami bias dan menyesatkan (*misleading*). *Misleading* terjadi pada data yang berdekatan karena adanya pengaruh data itu sendiri. Pada kondisi autokorelasi terjadi, *error terms* yang ada tidak independen. Residual pada periode sekarang dipengaruhi oleh residual periode sebelumnya sehingga kurva yang dihasilkan menjadi tidak normal.

Jika residual positif diikuti oleh residual positif lainnya, sedangkan residual negatif diasosiasikan dengan residual negatif lainnya, maka hal ini

menyalahi asumsi independensi dari *errors*, sehingga disebut autokorelasi positif, karena tanda yang ada dikelompokkan bersama. Sedangkan autokorelasi negatif terjadi dimana tiap residual yang ada diikuti oleh residual dengan tanda yang berlawanan. Pola yang ada menggambarkan bahwa *error terms* tidak independen.

Pengujian adanya autokorelasi antara residual periode  $t$  dan periode  $t-1$  dilakukan dengan menganalisa angka Durbin Watson-nya (Webster, 1998).

Persamaan statistik Durbin Watson (D-W) :

$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}$$

Dengan hipotesis yang diuji  $H_0: \rho e_t, e_{t-1} = 0$  (tidak ada autokorelasi)

$H_A: \rho e_t, e_{t-1} \neq 0$  (ada autokorelasi)

Nilai D-W hasil perhitungan dibandingkan terhadap D-W tabel yang tergantung pada derajat kebebasan dan jumlah variabel bebas. Penafsiran nilai  $d$  dapat dilihat pada tabel berikut :

Nilai $d$	Penafsiran
$d < d_1$	Autokorelasi positif
$d_1 < d < d_u$	Tidak dapat disimpulkan
$d_u < d < d_1$	Tidak ada autokorelasi baik negatif maupun positif
$4-d_u < d < 4-d_1$	Tidak dapat disimpulkan
$d_u > 4-d_1$	Autokorelasi negatif

Secara umum dapat disimpulkan bahwa bila nilai D-W mendekati nilai 2, maka  $H_0$  dapat diterima.

#### 3.6.4. Uji Heteroskedastisitas

Sebagaimana telah dibahas di atas mengenai asumsi yang ada pada model regresi linear berganda, maka  $\text{var}(u_i)$  harus sama dengan  $\sigma^2$  (konstan) atau dengan kata lain, semua residual atau error mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti ini disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan bila varian tidak konstan, atau berubah-ubah, disebut dengan heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model, dapat dilakukan dengan dua cara deteksi, yaitu secara grafis dan juga uji formal. Uji formal yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan Uji Breusch-Pagan-Godfrey dan Uji White.

### 3.6.5. Uji Signifikansi Model

Setelah model regresi berganda disusun, Webster (1998) menjelaskan perlunya dilakukan evaluasi terhadap model apakah sudah tepat dan menjelaskan data yang ada.

#### a. Standar Error dan Estimasi

Seperti halnya pada regresi sederhana, maka standar error,  $Se$ , dapat digunakan sebagai ukuran *goodness of fit*.  $Se$  mengukur derajat ketersebaran dari nilai  $Y$  di sekitar bidang regresi. Semakin kecil sebaran yang ada, maka akan semakin kecil nilai  $Se$ , sehingga model akan menjadi lebih akurat untuk digunakan dalam prediksi dan forecasting. Perhitungan standard error adalah sebagai berikut:

$$Se = \sqrt{\frac{\sum (Y - \hat{Y}_i)^2}{n - k - 1}}$$

Dimana  $n-k-1$  adalah nilai degrees of freedom, dan  $k$  adalah jumlah variabel di sisi kanan.

#### b. Koefisien Determinasi Berganda

Koefisien determinasi mengukur seberapa erat hubungan antara variabel independen dan nilai  $Y$  atau dapat digambarkan untuk menentukan *goodness of fit*. Hal ini untuk menjelaskan seberapa besar porsi perubahan  $Y$  (variabel terikat) yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel bebas di dalam model.

Koefisien Determinasi Berganda dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST}$$

Dimana variasi pada Y yang dijelaskan oleh model digambarkan oleh *regression sum of squares* (SSR) dan variasi keseluruhan dari Y diperhitungkan dari *total sum of squares* (SST).

Dengan menambahkan variabel baru dalam model, seharusnya nilai R-square semakin bertambah, karena dengan adanya variabel baru maka akan lebih menjelaskan nilai Y. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1, semakin mendekati 1 maka semakin erat hubungan antara Y dan variabel bebasnya.

#### c. Koefisien Determinasi Berganda Penyesuaian

Sangat memungkinkan bagi ahli statistik/ peneliti untuk meningkatkan nilai R-square dengan cara menambahkan variabel bebas yang tidak sesuai dan tidak menjelaskan nilai Y. Atas dasar tersebut, maka digunakanlah  $\bar{R}^2$ . Hal ini disebabkan karena derajat kebebasan dari SSE adalah  $n-k-1$ , maka penambahan variabel bebas akan mengurangi derajat kebebasan.  $\bar{R}^2$  akan menurun dengan penambahan variabel bebas yang tidak menjelaskan nilai Y. Koefisien Determinasi Berganda Penyesuaian dapat diperhitungkan sebagai berikut :

$$\bar{R}^2 = \frac{SSE / (n - k - 1)}{SST / (n - 1)}$$

Perhitungan lain yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat adalah :

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - R^2) \frac{n - 1}{n - k - 1}$$

#### d. Evaluasi Model secara Keseluruhan

Untuk menjawab pertanyaan apakah model memiliki nilai penjelasan secara keseluruhan, maka dilakukan pengujian *analysis of variance* (ANOVA). Prosedur ANOVA menguji apakah seluruh variabel bebas yang ada memiliki hubungan dengan variabel terikatnya. Jika variabel bebas tidak berhubungan dengan variabel terikat maka koefisiennya bernilai nol. Jika  $X_1$  tidak berhubungan dengan Y, maka  $\beta_1 = 0$ . ANOVA menguji hipotesis null, semua

nilai  $\beta$  adalah nol dan hipotesis alternatifnya yaitu setidaknya terdapat satu  $\beta$  yang tidak nol.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

$H_A$  : setidaknya satu  $\beta$  tidak nol

Jika  $H_0$  tidak ditolak, maka tidak ada hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Sedangkan bila  $H_0$  ditolak, maka setidaknya terdapat satu variabel bebas yang berhubungan secara linear dengan variabel terikat.

Pada prosedur ANOVA ini, terdapat tabel ANOVA dan pengujian yang dilakukan adalah F-test. Hal ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. F tabel memperhatikan derajat signifikansi (*level of significance*), derajat kebebasan regresi (jumlah variabel bebas, k) dan derajat kebebasan sampel ( $n-k-1$ ). Jika F tabel  $>$  F hitung, maka  $H_0$  diterima, dan sebaliknya (uji satu arah)

#### e. Menguji Koefisien Regresi Parsial

Pengujian berikutnya adalah menguji tiap koefisien secara individu, untuk menentukan koefisien yang manakah yang signifikan. Uji dilakukan untuk melihat koefisien mana yang signifikan, dan dilakukan satu per satu untuk setiap variabel bebas yang ada.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_A : \beta_1 \neq 0$$

Bila  $H_0$  diterima, maka variabel bebas tersebut tidak dapat memberikan kontribusi dan menjelaskan variabel terikat lebih jauh. Pengujian t-test standar digunakan dengan menggunakan derajat kebebasan  $n - k - 1$ .

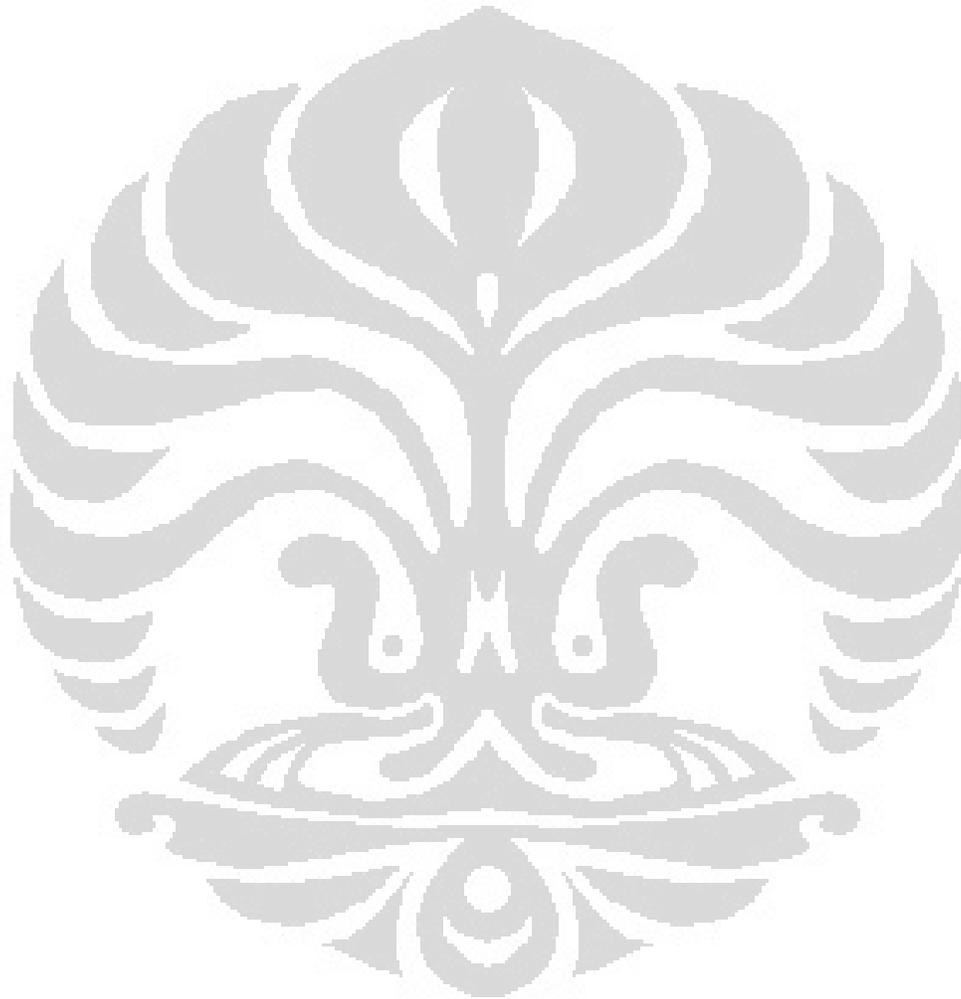
Tes hipotesis untuk mengetahui signifikansi dari koefisien regresi secara parsial dapat diperhitungkan sebagai berikut:

$$t = \frac{b_1 - \beta_1}{s_{b_1}}$$

Dimana  $s_{b_1}$  merupakan *standard error* dari koefisien regresi.

Uji tersebut merupakan uji dua arah dengan menggunakan nilai  $t_{hitung}$ .  $H_0$  ditolak jika  $t_{tabel} < -t_{hitung}$  atau  $> t_{hitung}$  dan hipotesis nol diterima jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$

$t_{hitung} < t_{tabel}$ . Nilai  $t_{hitung}$  tergantung pada  $\alpha$  (derajat kepercayaan) dan derajat kebebasan ( $n - k - 1$ )



## BAB 4

### PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

#### 4.1. Pendahuluan

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression*) dengan data *cross section*. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS dan E-Views. Analisis regresi berganda dilakukan terhadap fungsi variabel terikat yang dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas, dalam hal ini variabel terikat yang diteliti pertama kali adalah kinerja bank, yang ditunjukkan dengan *return on equity* (ROE). ROE merupakan fungsi dari beberapa variabel lainnya, yaitu karakteristik dewan komisaris, pemakaian auditor eksternal, dengan variabel kontrol berupa ukuran bank yang dinyatakan dengan besarnya aset dan *non performing loan* yang dinyatakan secara *net*.

Kemudian diteliti juga tingkat *non performing loan* sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas, yaitu karakteristik dewan komisaris, pemakaian auditor eksternal dan besarnya aset sebagai variabel kontrol.

Data yang digunakan adalah data *cross section*, yaitu data paralel atau tipe data *one-dimensional*. Data *cross section* tersebut dikumpulkan dari sampel yang memiliki jumlah banyak. Data ini mengacu pada cara pengumpulannya, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap banyak subyek pada jangka waktu yang sama, atau tanpa memperhatikan dimensi waktu. Dalam hal ini, digunakan data keuangan bank-bank di Indonesia dan informasi *corporate governance* yang dimiliki pada tahun 2006-2007.

Sebelum menghasilkan model regresi, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian pada data yang ada, apakah data tersebut telah memenuhi persyaratan model *cross section* yang optimal, yaitu Best Linear, Unbiased Estimator (BLUE). Asumsi-asumsi yang digunakan untuk meneliti apakah data dapat dikatakan BLUE adalah sebagai berikut:

- Hubungan linear antar parameter
- Tidak terdapat *multicolinearity*

- Tidak terdapat *autocorrelation* antar data
- Data yang digunakan *homoscedastic*

Pada bab ini akan dibahas statistik deskriptif dari setiap kelompok data. Gambaran dari setiap data yang ditampilkan secara keseluruhan, bagaimana penyebarannya, bagaimana distribusi yang dimiliki data tersebut, akan dijelaskan pada bab ini. Juga akan dibahas mengenai hubungan atau korelasi yang terjadi antar variabel. Untuk itu akan dilakukan uji multikolinearitas untuk menganalisis hubungan antar variabel sehingga dapat diketahui apakah kelompok data yang diuji cukup memenuhi syarat untuk dijadikan model dalam uji-uji selanjutnya.

Uji heteroskedastisitas juga dilakukan untuk mengetahui apakah *error* dalam persamaan memiliki varian yang sama. Lalu uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan parameter Durbin Watson. Asumsi data tidak memiliki autokorelasi, berarti residu dari suatu data tidak mempengaruhi residu data selanjutnya. Kemudian pengujian terakhir yang dilakukan adalah uji signifikansi yang dapat dilihat dari parameter *r*, *R-squared*, dan prob *t-stat*. Uji ini dibagi menjadi dua, yaitu uji model secara keseluruhan dan uji koefisien model. Semua hasil uji tersebut akan dilakukan pembahasan, baik itu pada uji model secara keseluruhan, maupun pada uji koefisien model.

#### 4.2. Statistik Deskriptif

Pengolahan data untuk menampilkan data statistik deskriptif dilakukan dengan menggunakan software SPSS dan atau E-Views serta hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.1. Variabel-variabel yang dijelaskan dalam statistik deskriptif ini, adalah sebagai berikut:

- Mean adalah nilai rata-rata dari satu seri data, diperoleh dengan menjumlahkan data seri dan membaginya dengan jumlah pengamatan
- Median atau nilai tengah diperoleh bila data yang ada disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian didapat nilai tengahnya.
- Max menggambarkan nilai maksimal dari data pengamatan
- Min menggambarkan nilai minimal dari data pengamatan
- Standar deviasi adalah ukuran persebaran data

- Skewness adalah ukuran kesimetrisan distribusi data terhadap nilai rata-ratanya
- Kurtosis memberikan ilustrasi kecuraman atau kelandaian distribusi data
- Obsevasi (N) menandakan jumlah sampel pengamatan.

**Tabel 4.1. Tabel Statistik Deskriptif**

	ROE	JBOC	MBOC	DBO	HG4	ASET	NPLN
Mean	14.7647	5.2157	15.8824	0.5133	0.6863	52,718,739.5487	2.1365
Median	14.0000	5.0000	11.0000	0.5000	1.0000	24,205,990.0000	1.7600
Maximum	36.0000	10.0000	69.0000	1.0000	1.0000	319,085,590.0000	13.3318
Minimum	1.0000	1.0000	-	-	-	1,203,433.3870	-
Std Dev	8.7146	2.1570	16.3409	0.2155	0.4686	75,130,985.8559	2.3637
Skewness	0.4154	0.2737	1.4955	(0.2702)	(0.8029)	1.9579	2.3697
Kurtosis	2.4408	2.1531	4.8333	3.9101	1.6446	5.9998	11.1249
Jarque-Bera	2.2763	2.1606	26.1513	2.1721	9.3831	51.7058	188.0141
Probability	0.3204	0.3395	0.0000	0.3375	0.0092	0.0000	-
Sum	753.0000	266.0000	810.0000	26.1767	35.0000	2,688,655,716.9800	108.9594
Sum Sq Dev	3,797.1760	232.6275	13,351.2900	2.3229	10.9804	2.82E+17	279.3583
Observations	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000	51.0000

Sumber: Diolah Penulis

Tabel 4.1. di atas memperlihatkan gambaran secara statistik terhadap variabel terikat (ROE) dan semua variabel bebas, yaitu karakteristik dewan komisaris (ukuran, independensi, banyaknya pertemuan), audit eksternal, dan variabel kontrolnya (besarnya aset bank dan NPL *net*).

Seperti terlihat pada tabel tersebut, nilai ROE maksimum pada kelompok data yang dimiliki adalah sebesar 36%. Nilai tersebut berbeda jauh dari nilai ROE yang paling kecil dari sebaran data yang ada, yaitu 1%. Nilai ROE yang terbesar tersebut dihasilkan oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., (BTPN) pada tahun 2007. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut bank BTPN dapat mencapai pertumbuhan usaha yang sangat pesat, berupa pencapaian sejumlah targetnya dan pencapaian pertumbuhan usaha di atas rata-rata pertumbuhan bank nasional secara keseluruhan. Seperti dijelaskan pada pembahasan manajemennya, pada tahun 2007 BTPN berhasil mengalami peningkatan pada aspek dana pihak ketiga yang cukup signifikan, yaitu sebesar 71,72%, jauh melebihi targetnya, dan juga jauh melampaui pertumbuhan dana pihak ketiga industri perbankan sebesar 13,5%. Di sisi pembiayaan, BTPN

berhasil mencapai pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 58,51%, yang tidak hanya mampu melampaui target bank pada tahun 2007, namun juga melampaui standar pertumbuhan industri perbankan nasional sebesar 11,72% untuk kredit konsumsi. Dengan demikian, BTPN juga berhasil meningkatkan laba sebelum pajak sebesar 124,86% dibandingkan posisi akhir tahun 2006 atau mencapai Rp 525 milyar.

Indikator pertumbuhan BTPN merupakan kontribusi atas implementasi rencana bisnis strategis tahun 2007, antara lain:

1. Melanjutkan proses pembentukan citra baru bank BTPN (*company image*) menjadi *retail bank* yang terpilih dan melayani dengan penuh kepedulian.
2. Mengembangkan produk pendanaan serta program promosi yang dilakukan secara intensif.
3. Meningkatkan jaringan distribusi yang mudah dijangkau dengan standar layanan yang konsisten.
4. Mengembangkan bidang teknologi informasi.

Sedangkan nilai ROE terkecil, dialami oleh PT Bank Eksekutif International Tbk pada tahun 2007. Hal ini disebabkan bank mengalami kerugian sebesar Rp 13 milyar rupiah hingga Mei 2007, setelah pada 2 tahun sebelumnya bank mengalami kerugian hingga Rp 46 milyar. Kerugian tersebut disebabkan tingkat *non performing loan* (NPL) atau kredit macet yang mencapai 6,19% pada akhir tahun 2006. Hal ini menyebabkan bank kembali tidak membagikan deviden pada tahun 2007. Kredit bermasalah tersebut sebagian besar berasal dari nasabah perorangan, terutama pada kredit konsumsi kendaraan bermotor, yang menguasai 80% dari total kredit. Selain itu, beban operasional bank (BOPO) juga masih cukup tinggi.

Pada variabel bebas yang pertama, yaitu jumlah anggota dalam dewan komisaris, rata-rata jumlah anggota komisaris pada bank yang digunakan dalam sampel ini adalah sekitar 5 orang, sedangkan jumlah anggota dewan komisaris minimum yang ada adalah sebanyak 1 orang, dan jumlah terbesar adalah sebanyak 10 orang.

Kemudian untuk variabel jumlah *meeting* atau pertemuan yang dilakukan oleh dewan komisaris, terdapat dewan komisaris yang melakukan

*meeting* terbanyak sebesar 69 kali dalam setahun, dan terdapat juga dewan komisaris bank yang tidak pernah mengadakan rapat dalam satu tahun. Sedangkan rata-rata jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris bank-bank dalam sampel sebanyak 15 kali dalam setahun.

Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris yang terbesar adalah seratus persen, atau seluruh anggota dewan komisaris merupakan komisaris independen, namun terdapat pula dewan komisaris yang tidak memiliki anggota independen. Sedangkan rata-rata proporsi komisaris independen di dalam dewan adalah sebanyak kurang lebih 50%. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku.

Nilai NPL yang tertinggi pada data bank-bank ini adalah sebesar 13.3%, yang mana nilai tersebut terbilang tinggi untuk tingkat kesehatan bank. Sedangkan nilai NPL terendah adalah nol, yang mana bank telah cukup dalam menyediakan *loan loss provision* untuk mengantisipasi kerugian akibat kredit bermasalah tersebut. Sedangkan rata-rata tingkat NPL pada bank-bank tersebut di tahun 2006-2007 adalah 2.14%.

Adapun *range* besarnya aset pada bank-bank sampel tersebut cukup besar, yaitu dari yang paling kecil adalah Rp 1,2 trilyun, sedangkan bank dengan aset terbesar adalah sebesar Rp 319,1 trilyun dan rata-rata aset pada bank-bank tersebut adalah sebesar Rp 52,72 trilyun.

Distribusi nilai dan frekuensi data diuji kenormalannya dengan menggunakan parameter Jarque-Berra. Secara informal, suatu distribusi dikatakan normal apabila nilai mean sama dengan median, tidak memiliki kecondongan, dan nilai kurtosis adalah sebesar 3. Secara formal, pengukuran bahwa suatu distribusi dikatakan normal atau tidak adalah dengan melihat nilai JB (Jarque Berra). JB mengikuti distribusi khi kuadrat dengan dua derajat kebebasan. Hipotesis yang diuji  $H_0$  : data tidak terdistribusi normal dan  $H_A$ : data terdistribusi normal.

Jika JB lebih besar daripada nilai kritis khi kuadrat maka  $H_0$  ditolak, data terdistribusi normal. Semakin besar nilai Jarque Berra, semakin menolak hipotesis null (data terdistribusi normal). *Software* E-Views mempermudah dilakukannya analisis dengan menampilkan *probability*. Jika *probability* di bawah 0,05 maka distribusi data adalah normal. Data yang tidak normal dibiarkan, karena

penelitian ini akan melihat kondisi sebenarnya dan terfokus pada pengaruh variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya.

### 4.3. Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel yang diujikan dalam perlakuan awal data adalah asumsi dasar bagi model multiple linear regression, yaitu pengujian multikolinieritas, pengujian autokorelasi, dan pengujian heteroskedastisitas. Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji korelasi antar variabel bebas yang ada dalam persamaan regresi berganda tersebut. Pengujian autokorelasi dilakukan untuk menguji kemungkinan error antar variabel. Sedangkan pengujian heteroskedastisitas untuk menguji apakah semua residual atau error mempunyai varian yang sama.

#### 4.3.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas pada dasarnya adalah pengujian untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara dua variabel bebas dalam satu regresi berganda. Permasalahan multikolinieritas timbul saat ada variabel bebas yang berhubungan secara linier dengan variabel bebas lain. Masalah tersebut disebabkan karena adanya korelasi yang tinggi di antara dua variabel bebas.

Multikolinieritas akan menyebabkan tidak dapat terdeteksinya efek individual dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Standar error koefisien, sb, menjadi lebih kecil dan tanda koefisien menjadi kebalikan dari logikanya. Bila nilai multikolinieritas tinggi, maka terdapat keterkaitan yang kuat antara variabel independen, sehingga persamaan tersebut seolah-olah memakai variabel yang sama, dan hal ini akan menjadikan model menjadi tidak terlalu baik.

Terdapat berbagai macam cara atau uji untuk mendekteksi adanya multikolinieritas, antara lain adalah dengan menggunakan angka *Variance Inflationary Factor* (VIF), dengan menggunakan *Condition Number*, menggunakan *Condition Index* (CI), maupun menggunakan angka *Tolerance*.

Pada persamaan ini akan digunakan angka VIF untuk menguji adanya multikolinieritas pada model tersebut. Pedoman pengujian dengan menggunakan angka VIF adalah sebagai berikut:

- Bila  $VIF > 5$  : terdapat kondisi moderate multicollinearity
- Bila  $VIF > 10$  : terdapat kondisi di mana terjadi strong multicollinearity.

Bila model yang diprediksi ini memiliki multikolinearitas, akan memunculkan akibat-akibat berikut ini:

- a. Estimator masih bisa bersifat BLUE, tetapi memiliki varian dan kovarian yang besar, sehingga sulit dipakai sebagai alat estimasi.
- b. Interval estimasi cenderung lebar dan nilai statistik uji t akan kecil sehingga menyebabkan variabel independen tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel independen.

Terdapat beberapa alternatif dalam menghadapi masalah multikolinearitas ini, antara lain adalah:

- a. Biarkan saja model kita memiliki multikolinearitas, karena estimatornya masih dapat bersifat BLUE. Sifat BLUE tidak terpengaruh oleh ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Namun harus diketahui bahwa multikolinearitas akan menyebabkan standard error yang besar.
- b. Tambahkan datanya bila memungkinkan, karena masalah multikolinearitas biasanya muncul karena jumlah observasinya sedikit. Apabila datanya tidak dapat ditambah, teruskan dengan model yang sekarang digunakan
- c. Hilangkan salah satu variabel independen, terutama yang memiliki hubungan linear yang kuat dengan variabel lain. Namun apabila menurut teori variabel independen tersebut tidak mungkin dihilangkan, berarti harus tetap dipakai
- d. Transformasikan salah satu (atau beberapa) variabel, termasuk misalnya dengan melakukan diferensi.

Pada persamaan yang kita miliki tersebut, diperoleh hasil nilai VIF seperti dapat dilihat pada Tabel 4.2..

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
JBOC	0.596	1.677
MBOC	0.568	1.759
IBOC	0.898	1.113
BIG4	0.571	1.752
LnASET	0.310	3.230
NPLN	0.932	1.073

a. Dependent Variabel: ROE

Sumber: Diolah Penulis

Dari hasil di atas, dapat diketahui bahwa nilai VIF dari variabel bebas yang ada seluruhnya lebih kecil dari 5, sehingga dapat diduga bahwa antara variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas pada Persamaan 1. Kemudian, pada Persamaan 2, juga dari nilai VIF yang ada, diketahui bahwa tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

#### 4.3.2. Uji Autokorelasi

Regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Squared* mengasumsikan bahwa galat untuk suatu nilai Y tidak akan mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh nilai galat Y yang lain. Hipotesis ini bisa diuji dengan melakukan plot residu dari sampel data. Bila tidak diperoleh pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa sesama galat tidak saling mempengaruhi. Secara matematis, digunakan tes Durbin Watson (D-W) untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi.

Secara umum, autokorelasi (*autocorrelation*) adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu (*time series*), karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat *cross section* seperti data pada penelitian ini.

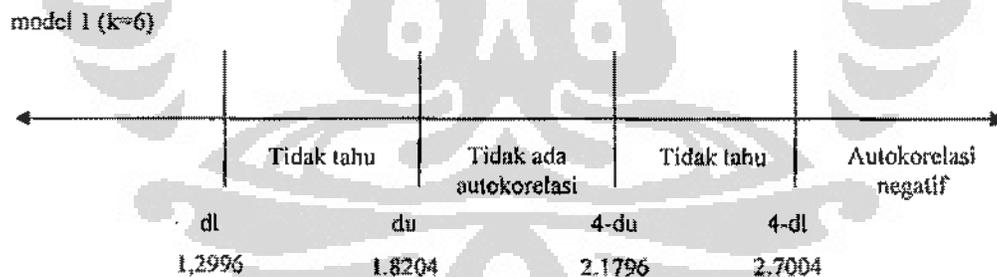
Apabila data yang kita analisis mengandung autokorelasi, maka estimator yang kita dapatkan memiliki karakteristik berikut ini:

- Estimator metode kuadrat terkecil masih linear
- Estimator metode kuadrat terkecil masih tidak bias
- Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum (*no longer best*). Dengan demikian, autokorelasi juga akan menyebabkan estimator tidak bersifat BLUE.

Untuk mengetahui apakah model yang ada memiliki autokorelasi, nilai D-W hasil perhitungan dibandingkan terhadap nilai D-W pada tabel. Nilai D-W tabel tergantung pada jumlah sampel dan jumlah variabel bebas (derajat kebebasan) dengan tingkat kepercayaan 95%.

Adapun permodelan yang digunakan pada Persamaan 1 dalam penelitian ini menggunakan 6 variabel terikat ( $K=6$ ), yaitu pengaruh jumlah anggota pada dewan komisaris, jumlah *meeting* yang dilakukan dewan komisaris dalam setahun, proporsi anggota komisaris independen dalam dewan, penggunaan auditor eksternal, besarnya aset, dan tingkat NPL secara net, terhadap *Return on Equity* (ROE) pada bank-bank.

Angka D-W untuk 51 pengamatan dengan tingkat signifikansi 5% yang berlaku untuk model tersebut ( $k = 6$ ) adalah sebagai berikut:



Hasil dari tes Durbin Watson pada model yang dimiliki, menunjukkan bahwa model memiliki nilai D-W sebesar 2,602. Bila dilihat pada gambar di atas, nilai 2,602 terletak pada area tidak tahu, maka dapat dikatakan bahwa pada model tersebut tidak dapat disimpulkan apakah pada model terdapat autokorelasi atau tidak terdapat autokorelasi.

Pada kondisi tidak terdapat kesimpulan seperti demikian, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menambah data yang ada. Namun, terdapat beberapa metode untuk menghilangkan bila terdapat autokorelasi pada model, yaitu dengan memperbaiki data, agar model tetap dapat digunakan. Beberapa alternatif menghilangkan masalah autokorelasi adalah sebagai berikut:

- a. Bila struktur autokorelasi ( $\rho$ ) diketahui
- b. Bila struktur autokorelasi ( $\rho$ ) tidak diketahui:
  - Bila  $\rho$  tinggi: metode diferensi tingkat pertama
  - Bila  $\rho$  rendah: metode *ordinary least squared* (OLS)
  - Bila  $\rho$  tidak diketahui: metode Cochrane-Orcutt

Masalah autokorelasi sangat penting diperhatikan pada data *time series*, yang mana melibatkan urutan waktu, dan uji ini mengharuskan tidak adanya hubungan *error* pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Karena data yang digunakan pada penelitian ini adalah data *cross section*, maka tidak akan dilakukan modifikasi data atau persamaan lebih lanjut, karena pengaruhnya tidak terlalu signifikan dan langkah yang seharusnya bisa diambil adalah penambahan data. Hal diterapkan pada Persamaan 1 dan juga Persamaan 2.

#### 4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Seperti telah dijelaskan di muka, asumsi dari model regresi adalah: (1) residual ( $e_i$ ) memiliki nilai rata-rata nol ; (2) residual memiliki varian yang konstan atau  $\text{var}(e_i) = \sigma^2$ , dan (3) residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya atau  $\text{cov}(e_i, e_j) = 0$ , sehingga menghasilkan estimator yang BLUE.

Apabila asumsi 1 tidak terpenuhi, yang terpengaruh hanyalah *slope* estimator dan ini tidak membawa konsekuensi serius dalam analisis ekonometris. Sedangkan apabila asumsi (2) dan (3) dilanggar, maka akan membawa dampak serius bagi prediksi dengan model yang dibangun.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Beberapa metode tersebut antara lain adalah:

- a. Metode grafik
- b. Uji Park

- c. Uji Glejser
- d. Uji Korelasi Spearman
- e. Uji Goldfeld-Quant.
- f. Uji Bruesch-Pagan-Godfrey
- g. Uji White

Pada penelitian ini, akan dipilih Uji White untuk mengetahui heteroskedastisitas dalam model yang ada. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independen.

Perlu diketahui terlebih dahulu bila suatu residual tersebut bersifat heterokedastisitas, yang akan mengakibatkan hal-hal berikut:

1. Estimator metode kuadrat terkecil tidak mempunyai varian yang minimum (tidak lagi *best*), sehingga hanya memenuhi karakteristik LUE (*linear unbiased estimator*). Meskipun demikian, estimator metode kuadrat terkecil masih bersifat linear dan tidak bias.
2. Perhitungan *standard error* tidak dapat lagi dipercaya kebenarannya, karena varian tidak minimum. Varian yang tidak minimum mengakibatkan estimasi regresi tidak efisien
3. Uji hipotesis yang didasarkan pada uji t dan uji F tidak dapat lagi dipercaya, karena *standard error*-nya tidak dapat dipercaya.

Hasil yang diperoleh dari Uji White pada persamaan yang dimiliki, dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Hasil Uji White**

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.188068	Probability	0.337214
Obs*R-squared	28.70077	Probability	0.324864

Sumber: Diolah Penulis

Pada hasil yang diperoleh dari program E-Views tersebut, diketahui bahwa probability untuk F-statistic dan Obs\*R-squared, masing-masing adalah

sebesar 0,337214 dan 0,324864. Sedangkan uji hipotesis yang ada adalah sebagai berikut:

$H_0$ : terjadi homoscedastic.

$H_1$ : terjadi heteroscedastic.

Pada tingkat kepercayaan 5%, maka bila *probability* < 5%, maka  $H_0$  ditolak, sedangkan bila *probability* > 5%, maka  $H_0$  tidak ditolak. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa *probability* untuk *F-statistic* dan *Obs\*R-squared* keduanya lebih dari 5%, sehingga  $H_0$  tidak ditolak, maka pada model tersebut terjadi homoscedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan demikian, maka model ini memenuhi asumsi BLUE. Kesimpulan seperti di atas juga didapatkan untuk Persamaan 2, sehingga pada model tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### 4.4 Analisis Terhadap Hasil Regresi Permodelan.

Pada penelitian ini dilakukan permodelan yang disusun berdasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada Tabel 4.4.a berikut menunjukkan hasil regresi dari permodelan yang ada dengan menggunakan software SPSS, yaitu model untuk mengetahui pengaruh karakteristik dewan komisaris (jumlah, banyaknya pertemuan, dan proporsi komisaris independen), besarnya aset bank dan tingkat NPL terhadap kinerja bank yang dinyatakan dalam ROE.

Secara umum, dari hasil regresi tersebut diketahui bahwa ROE bank-bank dipengaruhi secara signifikan oleh variabel kontrol yang ada, yaitu besarnya aset yang dimiliki bank dan tingkat NPL yang ada. Faktor-faktor lain yang digunakan dalam persamaan ini diketahui kurang signifikan dalam mempengaruhi besarnya ROE atau kinerja dari suatu bank di Indonesia. Adapun hasil dari regresi permodelan atas ROE tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4.a .

Kemudian pada Tabel 4.4.b dapat diketahui pula hasil yang diperoleh pada persamaan kedua, yang meneliti variabel yang telah digunakan sebelumnya pada Persamaan 1, yaitu karakteristik dewan komisaris, pemilihan auditor eksternal, terhadap tingkat NPL pada suatu bank.

Tabel 4.4.a. Hasil Regresi Permodelan atas *Return on Equity* (ROE)

	C	JBOG	MBOG	IBOG	BIG	LNASET	NPLN
ROE	-23,406	-0,587	-0,001	-7,679	1,515	2,796	-1,295
t-stat	-1,436	-0,984	-0,015	-1,580	0,540	2,439	-2,973
R-squared	0,428						
Adj. R-squared	0,350						
D-W	2,602						
St. Er	16,296	0,597	0,081	4,860	2,807	1,146	0,436
Sig.	0,158	0,330	0,988	0,121	0,592	0,019	0,005
Prob (F-Stat)	0,000						

Sumber: Diolah Penulis

Selanjutnya, hasil dari regresi permodelan atas NPL net juga dapat dilihat pada tabel Tabel 4.4.b.

Tabel 4.4.b. Hasil Regresi Permodelan atas *NPL net*

	C	JBOG	MBOG	IBOG	BIG	LNASET
NPLN	0,1131	0,0148	-0,0432	1,1540	0,0469	0,1197
t-stat	0,0203	0,0728	-1,6115	0,6971	0,0488	0,3051
R-squared	0,0673					
Adj. R-squared	-0,0363					
D-W	2,3655					
St. Error	5,5805	0,2043	0,0269	1,6553	0,9614	0,3923
Sig.	0,9839	0,9423	0,1141	0,4893	0,9613	0,7617
Prob (F-Stat)	0,6632					

Sumber: Diolah Penulis

Analisa signifikansi model dilakukan berdasarkan metode yang digunakan oleh Webster dan peneliti-peneliti sebelumnya. Data yang dihasilkan adalah proses pengolahan data pada software E-Views 4.1. dan SPSS

#### 4.4.1. Model I : Pengaruh karakteristik dewan komisaris, pemilihan auditor eksternal, besarnya aset, dan tingka NPL net terhadap ROE

Persamaan 1 yang digunakan dalam penelitian ini menerangkan satu variabel terikat, yaitu ROE yang dijelaskan oleh enam variabel bebas lainnya.

Hasil dari persamaan tersebut dapat dilihat pada model *multiple linear regression* berikut:

$$\text{ROE} = -23,406 - 0,587 \cdot \text{JBOC} - 0,001 \cdot \text{MBOC} - 7,679 \cdot \text{IBOC} + 1,515 \cdot \text{BIG4} \\ + 2,796 \cdot \text{LNASET} - 1,295 \cdot \text{NPLN}$$

Pengaruh variabel-variabel yang mewakili kondisi *corporate governance* pada bank, yaitu karakteristik dewan komisaris, menunjukkan pengaruh yang negatif untuk jumlah anggota dewan komisaris, jumlah *meeting* dan komposisi komisaris independen. *Control variable* yang berpengaruh negatif terhadap ROE adalah NPL *net*. Sebaliknya, variabel yang menunjukkan pengaruh positif adalah variabel *dummy* yang merupakan pemilihan auditor eksternal dan jumlah aset yang dimiliki oleh bank.

Dari hasil *adjusted R-squared* menunjukkan 35% dari ROE yang dapat dijelaskan oleh data variabel karakteristik dewan komisaris dan variabel kontrol lainnya yang berupa pemilihan auditor eksternal, besarnya aset dan tingkat NPL *net*. Dapat pula dikatakan bahwa jumlah anggota *Board of Commissioner* (BOC), frekuensi *meeting* BOC, proporsi *independent commissioner*, pemilihan *big 4* auditor eksternal, besarnya aset serta tingkat *non performing loan* secara bersama-sama menjelaskan perilaku *Return on Equity* (ROE) pada bank-bank di Indonesia sebesar 35% sehingga masih ada 65% variabel-variabel lain yang menjelaskan perilaku ROE yang tidak termasuk dalam model ini.

#### 4.4.1.1. Pengujian Hipotesis Model Secara Keseluruhan

Uji yang dilakukan terlebih dahulu adalah uji model secara keseluruhan, untuk mengetahui signifikansi model tersebut dalam menjelaskan variabel independen yang ada, yaitu ROE. Pengujian yang ada dilakukan dengan pengujian *analysis of variance* (ANOVA). Adapun hipotesis yang ada adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_k \neq 0$$

Pada model yang digunakan pada Persamaan 1, jumlah data ( $n$ ) sebanyak 51 dan jumlah variabel bebas ( $k$ ) sebanyak 6 variabel, maka dapat diperoleh derajat kebebasan ( $d = n - k - 1$ ) sebesar 44. Dengan demikian, dapat diketahui F-tabel sebagai *critical value* :

$$F_{\alpha}^{k,d} = F_{0,05}^{6,44} = 2,313$$

Setelah diketahuinya F-tabel, maka dilakukan uji statistik dengan membandingkannya dengan F-hitung yang diperoleh dari hasil program SPSS, yang mana F-hitung (SPSS) = 6,625 > 2,313 (F-tabel). Tingkat kepercayaan yang dipakai adalah 5%.

Bila F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka keputusan yang diambil adalah tolak  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Kesimpulan yang dapat diambil adalah model secara keseluruhan signifikan dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada, atau dengan kata lain model benar secara keseluruhan (nilai  $R^2$  adalah benar).

Setelah diketahui model secara keseluruhan adalah signifikan dalam menjelaskan variabel terikatnya, maka akan dibahas uji koefisien regresi secara parsial dan analisa yang dapat diambil dari hubungan antara masing-masing variabel bebas tersebut dalam menjelaskan variabel terikatnya.

#### 4.4.1.2 Uji Koefisien Regresi Parsial

Secara parsial dengan menggunakan *prob t-stat*, dapat diketahui tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan *testing hypothesis slope  $\beta$*  pada masing-masing variabel bebasnya. Hipotesis yang ada untuk pengujian ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

Variabel-variabel bebas tersebut akan dianalisa secara lebih mendalam, walaupun tidak memiliki hubungan yang signifikan dalam menjelaskan variabel terikatnya. Variabel bebas tersebut dapat memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan variabel terikatnya, bisa disebabkan karena data yang digunakan dalam pengamatannya perlu untuk mengalami penambahan dari data yang ada.

#### a. Jumlah Anggota *Board of Commissioner* (JBOC)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel JBOC sebesar 0,330. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil keputusan untuk menerima  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan itu dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota *Board of Commissioner* bukan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi *Return on Equity* (ROE).

Hubungan yang ada pada variabel terikat JBOC dengan ROE menunjukkan hubungan negatif, yang mana semakin kecil ukuran dewan komisaris, maka tingkat kinerja bank akan semakin meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Namun hal ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yang mana ditemukan hubungan yang negatif antara ukuran dewan dan pengukuran tingkat kinerja bank (Hermalin and Weisbach, 2003). Hal ini disebabkan karena ukuran dewan yang lebih kecil dipandang lebih efektif dan memiliki nilai tambah, karena dinilai lebih cekatan dan lebih mudah untuk bersatu padu atau menyatukan pendapat. Hal ini didukung oleh faktor pendukung yang berupa komunikasi yang lebih sederhana dan biaya yang dihabiskan untuk melakukan koordinasi akan menjadi lebih sedikit pada dewan yang berukuran kecil. Kondisi ini juga memungkinkan lebih sedikit terjadinya masalah-masalah *free-riding* atau masalah keberadaan sejumlah anggota namun tidak memberikan kontribusi yang berarti.

Dewan dalam jumlah besar dapat menyebabkan kesulitan bagi anggotanya untuk mengeluarkan pendapat dan idenya dalam rentang waktu yang terbatas pada saat rapat dewan.

#### b. Jumlah *Meeting Board of Commissioner* (MBOC)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel MBOC sebesar 0,988. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal itu dapat

diambil keputusan untuk menerima  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Kesimpulan yang dapat diambil adalah, jumlah *meeting Board of Commissioner* bukan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi *Return on Equity (ROE)*.

Hubungan antara *meeting* yang dilakukan oleh dewan dengan kinerja bank menunjukkan hubungan negatif, hal ini berarti bahwa jumlah *meeting* yang lebih sedikit dilakukan oleh bank, akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena *meeting* dalam jumlah yang sedikit akan lebih efektif, karena memiliki agenda yang lebih terfokus dalam membahas masalah-masalah yang dihadapi bank. Sebagai tambahan, dengan jumlah *meeting* yang lebih sedikit, lebih memaksa pada anggota dewan untuk dapat menghadiri rapat, sehingga tujuan rapat untuk membahas masalah perusahaan dengan melibatkan seluruh anggota dewan dapat tercapai.

#### c. Proporsi *Independent Commissioner* dalam BOC (IBOC)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel IBOC sebesar 0,121. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal itu dapat diambil keputusan untuk menerima  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen dalam *Board of Commissioner* bukan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi *Return on Equity (ROE)*.

Terdapat hubungan negatif antara proporsi dewan komisaris dalam menjelaskan kinerja perusahaan. Hal ini dapat disebabkan, tingginya jumlah komisaris independen, akan mengurangi kinerja perusahaan karena komisaris independen pada umumnya kurang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terhadap bank yang dikelolanya, sehingga kurang dapat untuk memberikan kontribusi mengenai strategi perusahaan ke depan dengan mempertimbangkan segala sumber daya perusahaan.

**d. Penggunaan Kantor Firma Audit yang Termasuk dalam Big 4 (BIG4)**

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel BIG4 sebesar 0,592. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal itu dapat diambil keputusan untuk menerima  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemakaian auditor eksternal yang termasuk ke dalam empat besar sebagai auditor eksternal bank bukan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi *Return on Equity* (ROE).

Berdasarkan model yang dihasilkan, pemilihan auditor eksternal dapat mempengaruhi tingkat kinerja bank, karena berdasarkan fungsi auditor eksternal dalam *corporate governance*, diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi kinerja bank.

**e. Nilai aset perusahaan (LNASET)**

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel LNASET sebesar 0,002. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal itu dapat diambil keputusan untuk tolak  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai *assets* perusahaan merupakan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi *Return on Equity* (ROE).

Variabel besarnya aset yang dimiliki bank berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja bank, karena semakin besar aset yang dimiliki bank, akan semakin memperbesar pula kesempatan untuk bank dalam melakukan ekspansi usaha dan menghasilkan keuntungan.

**f. Tingkat *Non performing loan Net* (NPLN)**

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel NPLN sebesar 0,005. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal itu dapat diambil

keputusan untuk tolak  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat non performing loan suatu bank merupakan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi *Return on Equity* (ROE).

Nilai NPL net tersebut secara signifikan berpengaruh negatif terhadap ROE, karena dengan tingkat NPL yang semakin rendah, maka kemungkinan bank untuk mengalami kerugian akibat kredit yang tidak terbayarkan kembali semakin kecil. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi terhadap meningkatnya kinerja bank yang ada.

Berdasarkan analisa uji koefisien regresi parsial tersebut di atas, diketahui hanya variabel kontrol yang berupa besarnya aset dan tingkat NPL bank yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ROE, sedangkan variabel yang berupa karakteristik dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Sehingga dapat disimpulkan untuk menolak hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, yaitu  $H_1$ ,  $H_2$  dan  $H_3$ .

#### 4.4.2. Model II : Pengaruh karakteristik dewan komisaris, pemilihan auditor eksternal, dan besarnya aset, terhadap NPL

Persamaan 2 yang digunakan dalam penelitian ini akan melihat hubungan antara NPL net yang akan dicoba dijelaskan oleh lima variabel bebas lainnya. Hasil dari persamaan tersebut dapat dilihat pada model *multiple linear regression* berikut:

$$\text{NPLN} = 0.113 + 0.0149 \cdot \text{JBOC} - 0.0433 \cdot \text{MBOC} + 1.1540 \cdot \text{IBOC} + 0.0469 \cdot \text{BIG4} + 0.1197 \cdot \text{LNASET}$$

Satu-satunya variabel bebas yang memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat NPLN adalah jumlah *meeting* yang dilakukan oleh dewan komisaris, sedangkan variabel lainnya menunjukkan pengaruh positif. Dari hasil *adjusted R-squared* menunjukkan nilai negatif sebesar 3,63%. Hasil negatif pada *adjusted R-squared* ini mungkin terjadi, yang mana disebabkan oleh karena hasil *R-squared* pada perhitungan (dengan program SPSS) lebih kecil dari hasil *R-squared* yang

diharapkan (*expected R-squared*) dengan menggunakan jumlah variabel bebas yang sama.

Persamaan untuk menentukan *expected R-squared* dapat dilakukan dengan persamaan yang cukup simpel pada regresi *ordinary least squared* yaitu dengan menghitung nilai  $K/N$ . Persamaan tersebut dapat dijelaskan dengan  $K$  adalah jumlah variabel bebas yang ada dan  $N$  adalah jumlah *degree of freedom* (jumlah sampel dikurangi 1). Pada persamaan kedua ini, jumlah variabel bebas adalah 5 ( $K=5$ ) dan jumlah *degree of freedom*, yaitu jumlah sampel dikurangi 1, adalah 50 ( $N=50$ ), sehingga *expected R-squared* adalah 0,1. Dari hasil *R-squared* pada perhitungan SPSS, diperoleh nilai sebesar 0,0673, sehingga diperoleh kemungkinan terjadinya *adjusted R-squared* yang negatif. Interpretasi yang dapat ditarik dari kondisi ini adalah adanya kondisi di mana model yang dibentuk tidak terlalu baik dalam menjelaskan variabel terikatnya, atau adanya variabel-variabel bebas yang kurang baik atau bahkan sama sekali tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya.

Hal ini juga dapat semakin dijelaskan dengan melihat pada persamaan untuk menghitung *adjusted R-squared* sebagai berikut:

$$\text{Adjusted } R\text{-squared} = 1 - \left( (1 - R^2) \times \frac{(N - 1)}{(N - k - 1)} \right)$$

Dapat diketahui bila jumlah observasi ( $N$ ) pada persamaan relatif sedikit atau tidak sebanding dengan jumlah variabel bebasnya ( $k$ ), maka akan terjadi perbedaan nilai yang semakin besar antara *R-squared* dengan *adjusted R-squared*, dan menyebabkan model yang ada memiliki nilai *adjusted R-squared* yang negatif.

#### 4.4.2.1. Pengujian Hipotesis Model Secara Keseluruhan

Pada persamaan kedua, pertama kali juga akan dilakukan uji model secara keseluruhan, untuk mengetahui signifikansi model tersebut dalam menjelaskan variabel independen yang ada, yaitu *NPL net*. Pengujian yang ada dilakukan dengan pengujian *analysis of variance* (ANOVA). Adapun hipotesis yang ada adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_k = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_k \neq 0$$

Pada model yang ada, jumlah data ( $n$ ) sebanyak 51 dan jumlah variabel bebas ( $k$ ) sebanyak 5 variabel, maka dapat diperoleh derajat kebebasan ( $d = n - k - 1$ ) sebesar 45. Dengan demikian, dapat diketahui F-tabel sebagai *critical value* :

$$F_{\alpha}^{k,d} = F_{0,05}^{6,45} = 2,422.$$

Setelah diketahuinya F-tabel, maka dilakukan uji statistik dengan membandingkannya dengan F-hitung yang diperoleh dari hasil program SPSS, yang mana F-hitung (SPSS) = 0,6631 < 2,422 (F-tabel). Tingkat kepercayaan yang dipakai adalah 5%.

Karena hasil yang diperoleh adalah F-hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka keputusan yang diambil adalah tidak menolak  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Kesimpulan yang dapat diambil adalah model secara keseluruhan tidak signifikan dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada atau dengan kata lain nilai  $R^2$  adalah tidak benar.

Model secara keseluruhan tidak signifikan dalam menjelaskan variabel terikatnya, dan selanjutnya akan dilakukan uji koefisien regresi parsial. Kondisi di mana model secara keseluruhan tidak signifikan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah karena pemilihan variabel bebas yang kurang tepat ataupun jumlah data pengamatan yang perlu dilakukan penambahan. Namun demikian, tetap akan dilihat dan dianalisa hubungan yang terjadi di antara masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam persamaan ini dengan variabel terikatnya.

#### 4.4.2.2 Uji Koefisien Regresi Parsial

Secara parsial dengan menggunakan prob t-stat, dapat diketahui tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan *testing hypothesis slope  $\beta$*  pada masing-masing variabel bebasnya. Hipotesis yang ada untuk pengujian ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

#### a. Jumlah Anggota *Board of Commissioner* (JBOC)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel JBOC sebesar 0,942. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal itu dapat diambil keputusan untuk menerima  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga bisa disimpulkan bahwa jumlah anggota *Board of Commissioner* bukan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi *NPL net*.

Hubungan antara jumlah anggota dewan komisaris, menunjukkan hubungan yang positif, yang mana semakin banyaknya jumlah anggota dewan, akan semakin meningkatkan nilai NPL pada suatu bank. Penjelasan yang dapat diberikan pada kondisi ini, kurang lebih sama dengan penjelasan pada Persamaan 1, dimana terlalu banyak jumlah anggota, akan menjadikan dewan tersebut kurang efektif dalam bekerja dan menimbulkan masalah-masalah seperti *free-riding problems*.

#### b. Jumlah *Meeting Board of Commissioner* (MBOC)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel MBOC sebesar 0,114. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil keputusan untuk menerima  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah *meeting Board of Commissioner* bukan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi *NPL net*.

Hubungan pada persamaan yang dihasilkan menunjukkan hubungan yang negatif antara jumlah *meeting* dewan komisaris dengan tingkat *NPL net*. Sehingga, semakin sedikit rapat yang dilakukan akan menyebabkan tingkat *NPL* bank akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena pada kondisi di mana *non performing loan* terjadi pada portfolio kredit suatu bank, diperlukan lebih banyak konsolidasi pada pihak-pihak yang terkait untuk mengatasi masalah *NPL* tersebut dan dibicarakan pula langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulangnya. Hal ini dapat diawali dengan semakin seringnya frekuensi

rapat yang dilakukan komisaris, untuk terlebih dahulu membahas mengenai segala aspek yang berhubungan dengan terjadinya atau dimilikinya tingkat NPL pada bank tersebut. Diharapkan dengan demikian akan dapat diketahui lebih awal penyebab yang ada dan langkah-langkah yang dapat diambil selanjutnya, untuk mencegah nilai NPL menjadi semakin bertambah.

**c. Proporsi Independent Commissioner dalam BOC (IBOC)**

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel IBOC sebesar 0,489. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil keputusan untuk menerima  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan itu dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen dalam *Board of Commissioner* bukan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi NPL *net*.

Hubungan yang ditunjukkan antara proporsi komisaris independen terhadap tingkat NPL adalah positif. Sehingga dengan semakin banyaknya komisaris independen pada suatu dewan, maka akan mempengaruhi tingkat NPL yang semakin meningkat. Hal ini dapat dijelaskan dengan banyaknya komisaris independen, keanggotaan dewan tersebut menjadi kurang mengerti dan mendalami kondisi maupun operasional bank, yang dapat memicu pada kegiatan bank yang kurang sesuai sehingga menimbulkan tingkat NPL yang tinggi.

**d. Penggunaan Kantor Firma Audit yang Termasuk dalam Big 4 (BIG4)**

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh *critical value* sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel BIG4 sebesar 0,9613. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil keputusan untuk menerima  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemakaian auditor eksternal yang termasuk ke dalam empat besar sebagai auditor eksternal bank bukan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi NPL *net*.

Hubungan yang ada antara pemakaian empat besar perusahaan auditor eksternal terhadap tingkat NPL pada bank adalah positif, sehingga dengan dipakainya auditor eksternal tersebut, akan semakin meningkatkan nilai NPL. Hal ini dapat disebabkan karena pemakaian auditor eksternal tersebut akan dapat mempengaruhi pencatatan dan pengakuan terjadinya NPL pada bank, sehingga menyebabkan nilainya menjadi lebih tinggi.

#### e. Nilai Asset Perusahaan (LNASET)

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka diperoleh critical value sebesar  $\alpha/2 = 0,05/2 = 0,025$ . Dari hasil pengolahan SPSS, dihasilkan nilai sig. untuk variabel LNASET sebesar 0,761. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,025 ( $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil keputusan untuk tolak  $H_0$  pada  $\alpha = 0,05$ . Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai asset perusahaan merupakan variabel yang signifikan untuk mempengaruhi NPL *net*.

Hubungan yang ada antara besarnya aset dengan tingkat NPL adalah positif, sehingga semakin besarnya nilai aset bank, dapat menyebabkan nilai NPL yang tinggi. Hal ini disebabkan dengan semakin besarnya tingkat aset yang dimiliki bank, maka akan semakin besar usaha yang diperlukan untuk mengendalikan tingkat NPL bank, yang dapat berpengaruh pada semakin meningkatnya nilai NPL bank bila nilai asetnya semakin besar pula.

Berdasarkan seluruh analisa uji koefisien regresi parsial tersebut di atas, diketahui bahwa tidak ada satupun variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen NPL *net*. Sehingga disimpulkan untuk menolak hipotesis yang dibuat sebelumnya, yaitu  $H_4$ ,  $H_5$  dan  $H_6$ .

#### 4.5. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai hasil analisis pada penelitian ini antara lain adalah:

- Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator kinerja keuangan pada bank-bank di Indonesia, yaitu ROE tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada pada *corporate governance*, dan lebih dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-

faktor internal perusahaan, yaitu besarnya aset dan tingkat NPL *net* yang dimiliki.

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, jumlah *meeting* yang dilakukan, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan ROE. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diharapkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank yang ditunjukkan dengan ROE.
- Tingkat kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan ROE hanya dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor internal bank, yaitu besarnya aset yang dimiliki dan tingginya tingkat NPL *net* yang ada.
- Sedangkan tingkat NPL *net* sendiri juga tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor pada *corporate governance* dan juga tidak dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan.
- Serupa dengan hasil penelitian pada model pertama, penelitian pada NPL juga menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, jumlah *meeting* yang dilakukan, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat NPL *net* suatu bank. Bahkan secara keseluruhan, model tidak dapat menjelaskan tingkat NPL *net* tersebut dari variabel-variabel yang ada. Sehingga kemungkinan besar, tingkat NPL *net* lebih dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian Penutup pada Tesis ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan pengguna penelitian ini

#### 5.1. Kesimpulan

Data berupa *cross section* pada penelitian ini yang berupa tingkat kinerja bank yang dinyatakan dalam ROE dan juga indikator keuangan bank yaitu *NPL net*, telah diujikan dalam analisis regresi berganda terhadap beberapa faktor *corporate governance* dan faktor internal bank. Hasil dan kesimpulan yang dapat diambil antara lain adalah:

- Penelitian ini memperlihatkan bahwa indikator kinerja keuangan pada bank-bank di Indonesia, yaitu ROE tidak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor yang ada pada *corporate governance*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* bukan merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mendukung atau memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan.
- Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, jumlah *meeting* yang dilakukan, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan ROE. Sehingga, pernyataan bahwa karakteristik dewan komisaris dapat berpengaruh secara signifikan untuk memberikan sumbangan pada kinerja perusahaan, tidak dapat dilihat pada penelitian kali ini.
- Tingkat kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan ROE hanya dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor internal bank, yaitu besarnya aset yang dimiliki dan tingginya tingkat *NPL net* yang ada. Semakin besarnya aset suatu bank, maka akan memungkinkan bank untuk melakukan ekspansi usaha dan melakukan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini tentu dapat memberikan kontribusi secara positif terhadap kinerja suatu bank. Sedangkan

- tingkat NPL *net* berkorelasi negatif terhadap tingkat kinerja perusahaan, dimana semakin rendahnya NPL *net* suatu bank, maka kemungkinan kredit macet atau nasabah yang *default* akan semakin kecil, sehingga dana yang telah dikeluarkan bank dalam bentuk kredit dapat kembali untuk digunakan bank bagi pengembangan usahanya. Dengan demikian, rendahnya NPL *net* akan memberikan pengaruh pada tingginya tingkat kinerja bank.
- Tidak adanya hubungan yang signifikan antara faktor-faktor *corporate governance* untuk mempengaruhi kinerja bank dapat juga disebabkan karena adanya kondisi sebagai hasil evaluasi yang dilakukan Bank Indonesia terhadap perbankan nasional. Berdasarkan evaluasi tersebut, sebagian besar bank nasional belum memenuhi ketentuan tata kelola yang baik (*good corporate governance/GCG*). Hasil evaluasi Bank Indonesia (BI) menyebutkan sekitar 69,3 persen bank yang beroperasi di Indonesia belum memenuhi ketentuan GCG. Ketentuan GCG yang paling banyak dilanggar perbankan adalah keberadaan komisaris independen dan komite perbankan yang lengkap. Evaluasi BI terhadap 101 bank periode September 2007 menemukan 53,5 persen bank belum memiliki komisaris independen dan 30,7 persen bank belum membentuk komite secara lengkap.
- Sedangkan tingkat NPL *net* sendiri juga tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor pada *corporate governance* dan juga tidak dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan.
- Serupa dengan hasil penelitian pada model pertama, penelitian pada NPL juga menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, jumlah *meeting* yang dilakukan, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat NPL *net* suatu bank. Bahkan secara keseluruhan, model tidak dapat menjelaskan tingkat NPL *net* tersebut dari variabel-variabel yang ada. Sehingga kemungkinan besar, tingkat NPL *net* lebih dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang ada untuk dapat menjelaskan secara lebih baik ruang lingkup yang digunakan pada penelitian ini. Adapun keterbatasan penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penelitian ini menggunakan data pada laporan tahunan bank dan laporan keuangannya pada tahun 2006 dan 2007. Hal ini dilakukan karena pada penelitian ini mencoba untuk melihat kondisi terakhir, khususnya pada hubungan antara faktor GCG, yaitu karakteristik dewan komisaris terhadap tingkat kinerja bank dan tingkat NPL bank.
- Jumlah data yang digunakan dalam penelitian berjumlah 51 data, yang bank yang digunakan dalam penelitian adalah bank umum komersial yang memiliki data cukup lengkap mengenai ketaatan pada GCG dan juga kelengkapan data laporan keuangan.

## 5.3. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan pada pengguna penelitian ini termasuk regulator yang terkait antara lain adalah:

- Berdasarkan hasil yang signifikan pada hubungan antara besarnya aset dan tingkat NPL pada bank terhadap kinerjanya, maka regulator maupun investor dapat memperhatikan kedua faktor tersebut untuk mengetahui dan mempertimbangkan bank dengan tingkat kinerja yang lebih baik.
- Melihat pentingnya *good corporate governance* bagi kemajuan industri, khususnya perbankan seperti telah disebutkan pada penelitian dan tulisan serta sumber yang ada sebelumnya, maka sudah sepantasnya jika regulator semakin menegakkan penerapan *good corporate governance* di Indonesia. Hal ini mempertimbangkan adanya kondisi di mana penerapana GCG di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Agar supaya industri perbankan di Indonesia lebih dapat bersaing, terutama di era global, maka GCG merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penerapannya.

Selanjutnya, saran-saran yang dapat diberikan untuk menentukan tingginya tingkat kinerja perusahaan yang dinyatakan dalam ROE dan juga untuk menentukan tingginya tingkat NPL *net* antara lain adalah sebagai berikut:

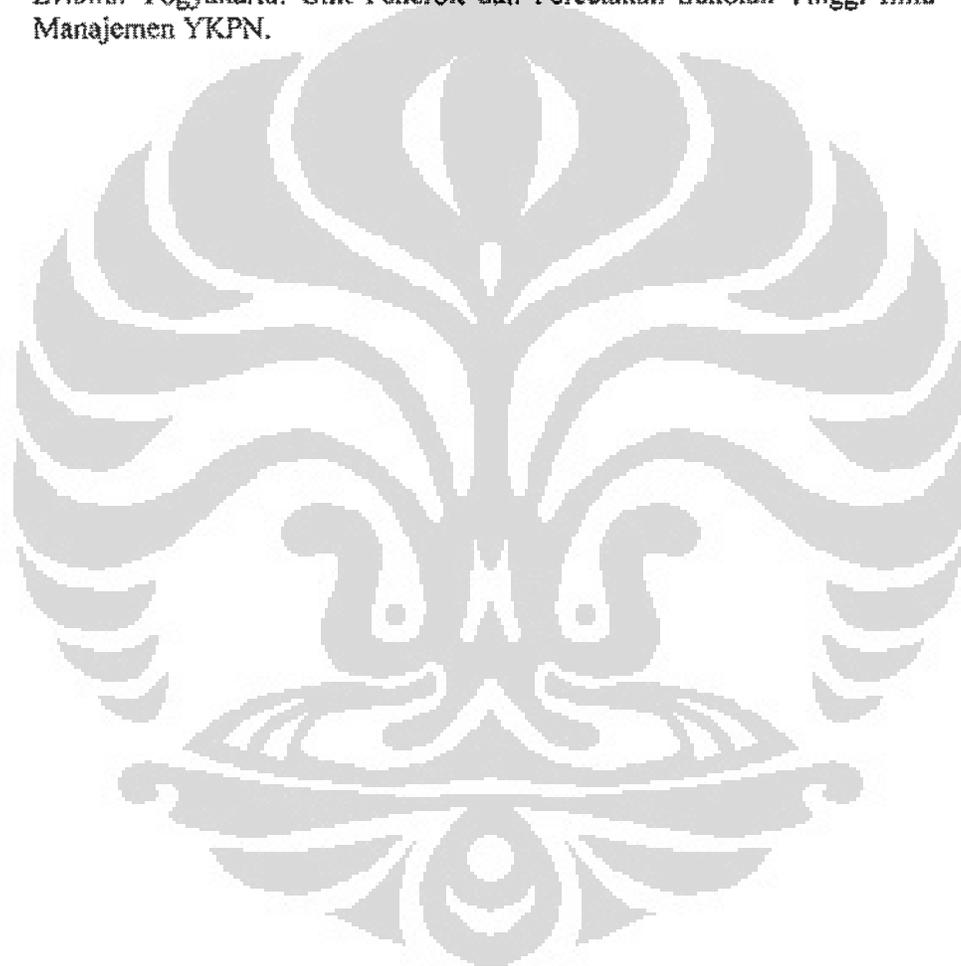
- Perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap variabel-variabel independen lainnya, terutama yang berhubungan dengan *corporate governance*, untuk mengetahui variabel manakah yang lebih berpengaruh terhadap kinerja bank dan tingkat NPL *net*-nya.
- Data yang digunakan dalam analisis regresi pada penelitian ini masih terbatas dan relatif sedikit. Sehingga untuk lebih memperbaiki sebaran data dan model yang ada, sebaiknya digunakan data dengan jumlah yang lebih banyak.
- Begitu pula yang terjadi pada penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi NPL *net*, sebaiknya dilakukan pula analisis terhadap variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi NPL *net*, terutama dengan memperhitungkan risiko kredit yang mungkin ditimbulkan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adams, R. & Mehran, H. (2003). *Is corporate governance different from bank holding companies?* *FRBNY Economic Policy Review*, 9, 123-142.
- Adams, R. & Mehran, H. (2005). *Corporate performance, board structure and its determinants in the banking industry*. Available at SSRN: <<http://ssrn.com/paper=302593>>
- Annual report bank-bank di Indonesia tahun 2006-2007
- Arafat, Wilson (2006). *Manajemen Perbankan Indonesia, teori dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Belkhir, M. (2005). *Board structure, ownership structure, and firm performance: evidence from banking*. Available at SSRN: <<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?paper=604505>>.
- Belkhir, Mohamed. (2008). *Board of Directors's Size and Performance in the Banking Industry*. Forthcoming in the *International Journal of Managerial Finance*
- Bhagat, S. & Black, B. (1999). *The uncertain relationship between board composition and firm performance*. *Business Lawyer*, 54, 921-63
- Brick, Ivan E & Chidambaran, N.K. (2007). *Board Meetings, Committee Structure and Firm Performance*. Whitcomb Center for Research in Financial Services, Rutgers University and by a Faculty Research Grant from the Rutgers Business School - Newark and New Brunswick
- Eisenberg, T., Sundgren, S. & Well, M. (1998). *Larger board size and decreasing firm value in small firms*. *Journal of Financial Economics*, 48(1), 35-54.
- Fama, E. & Jensen, M. (1983). *Separation of ownership and control*. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-25.
- Greuning, Hennie van & Bratanovic, Sonja Brajovic. (2003). *Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk (Second Edition)*. Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.
- Hale, Roger H. (1989). *Credit Analysis: A Complete Guide*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Hermalin, B. E. & Weisbach, M. S. (2003). *Boards of directors as an endogenously determined institution: a survey of the economic literature*. *FRBNY Economic Policy Review*, 9, 7-26.

- Kameyama, Takuji et. Al (2005). *Corporate Governance of Banks in Indonesia*, PT UFJ Institute Indonesia, Forum for Corporate Governance in Indonesia working paper.
- Kole, S. (1997). *The complexity of compensation contracts*. Journal of Financial Economics, 43(1), 79-104.
- Levine, R. (2003). *The corporate governance of banks: a concise discussion of concepts and evidence*. World Bank Forum on Global Corporate Governance, Discussion Paper No. 3, <http://www.gcgf.org>.
- Macey, Jonathan R, & O'Hara, Maureen (2003). *The Corporate Governance of Banks*. FRNBY Economic Policy Review.
- Merton, R. C. (1977). *An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees*. Journal of Banking and Finance, 1(2), 3-11.
- Nachrowi, Nachrowi D & Usman, Hardius. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pathan, Shams, Skully, Michael T., and Wickramanayake, J. (2007). *Board Size, Independence and Performance: An Analysis of Thai Banks*. Asia-Pacific Financial Markets, Vol. 14, No. 3, pp. 211-227, School of Business, Bond University, Monash University - Department of Accounting and Finance
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006
- Reddy, Y R K and Raju, Yerram. (2000). *Corporate Governance in Banking and Finance*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Riyadi, Selamet (2006). *Banking Assets and Liability Management (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rosenstein, S. & Wyatt, J. (1990). *Outside directors, board independence, and shareholder wealth*. Journal of Financial Economics, 26(2), 175-84.
- Sitompul, Zulkarnaen (2005), *Problematika Perbankan*. Jakarta: Books Terrace & Libarary,
- Skully, M. T. (2002). *Banking and corporate governance: some prudential issues*. Presented in Second International Conference on Banking and Finance in Greece, August 9-11, 2002.

- Susilo, Leo J & Simarmata, Karlen. (2007). *Good Corporate Governance pada Bank. Tanggung Jawab Direksi & Komisaris dalam Melaksanakannya*. Bandung: PT Hikayat Dunia.
- Victor, D. A., and Peter, H. (2004). *Does the composition and practice of board of directors bear any relationship to the performance of their companies?* *Corporate Governance: An International Review*, 12(3), 263-80.
- Webster, Allen L. (1998). *Applied Statistic for Business and Economics*. Singapore: Irwin/ McGraw-Hill.
- Winarno, Wing Wahyu. (2007). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.



Lampiran 1  
Data Return on Equity dan Variabel-variabel Lainnya

Annual Report 2006-2007		ROE	JBOC	MBOC	IBOC	BIG4	LNASET	NPLN
No	Name	% ROE	BOC			External Auditor	Ln Assets	NPL - net (%)
			Jumlah Anggota	Jumlah Meeting	% Independent Commissioner			
1	BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK	3	6	0	0.33	0	16.24	2.55
2	BANK BUKOPIN TBK	22	7	26	0.43	1	17.35	0.02
3	BANK BUMI ARTA TBK	7	3	5	0.67	0	14.48	1.78
4	BANK BUMIPUTERA INDONESIA TBK	4	6	12	0.50	1	15.66	4.56
5	BANK CAPITAL INDONESIA TBK	9	3	2	0.67	0	14.00	0.00
6	BANK CENTRAL ASIA TBK	26	5	69	0.60	1	19.20	0.20
7	BANK CENTURY TBK	7	4	4	0.50	0	16.49	3.33
8	BANK CHINATRUST	15	5	4	0.60	1	15.31	1.74
9	BANK DANAMON INDONESIA TBK	22	7	30	0.57	1	18.31	0.68
10	BANK EKONOMI RAHARJA TBK	20	3	4	0.67	1	16.57	2.06
11	BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL TBK	1	3	0	0.67	0	14.12	13.33
12	BANK EKSPOR INDONESIA	6	3	12	1.00	1	16.15	0.62
13	BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 TBK	20	3	12	0.67	0	14.20	0.45
14	BANK INTL INDONESIA TBK	10	8	9	0.50	1	17.83	2.34
15	BANK KESAWAN TBK	5	1	3	1.00	0	14.60	6.33
16	BANK LIPPO TBK	27	7	13	0.71	0	17.48	0.54
17	BANK MANDIRI TBK	19	7	20	0.71	1	19.58	1.50
18	BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TBK	5	4	4	0.50	0	15.31	0.14
19	BANK MEGA TBK	25	3	27	0.67	1	17.37	1.05
20	BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	8	7	40	0.43	1	19.03	4.01
21	BANK NIAGA TBK	17	5	13	0.60	1	17.82	2.30
22	BANK NISP TBK	8	8	4	0.50	1	17.18	2.12
23	BANK PERMATA TBK	18	8	10	0.50	1	17.49	1.53
24	BANK PANIN	13	4	13	0.50	1	17.79	1.76
25	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	31	7	36	0.57	1	19.13	0.00
26	BANK SINARMAS	3	3	64	0.67	0	15.51	0.00
27	BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK	36	4	0	0.00	1	16.17	0.16
28	BANK TABUNGAN NEGARA	21	3	35	0.00	1	17.42	2.86
29	BANK UOB BUANA TBK	13	5	4	0.20	1	16.72	2.69
30	BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK	15	3	4	0.33	0	15.48	0.20
31	BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK	6	4	4	0.50	0	14.15	0.14
32	BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK	5	8	0	0.38	0	16.22	4.85
33	BANK BUMI ARTA TBK	11	3	5	0.00	0	14.37	1.82
34	BANK BUMIPUTERA INDONESIA TBK	1	5	12	0.60	1	15.50	4.74
35	BANK CENTRAL ASIA TBK	29	5	50	0.60	1	18.99	1.30
36	BANK CHINATRUST	26	6	5	0.33	1	15.20	1.22
37	BANK DANAMON INDONESIA TBK	15	7	6	0.29	1	18.22	0.00
38	BANK EKONOMI RAHARJA TBK	19	2	4	0.50	1	16.48	2.15
39	BANK INTL INDONESIA TBK	19	10	11	0.40	1	17.79	3.62
40	BANK LIPPO TBK	23	7	18	0.71	0	17.32	0.40
41	BANK MANDIRI TBK	11	7	27	0.57	1	19.40	5.92
42	BANK MEGA TBK	9	3	29	0.67	1	17.25	1.16
43	BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	22	6	14	0.50	1	18.95	6.55
44	BANK NIAGA TBK	16	8	24	0.50	1	17.66	2.51
45	BANK NISP TBK	11	10	4	0.36	1	17.00	1.99
46	BANK PERMATA TBK	13	8	28	0.50	1	17.45	3.30
47	BANK PANIN	14	4	9	0.40	1	17.52	2.60
48	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	33	7	45	0.57	1	18.86	0.00
49	BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK	12	3	5	0.33	0	14.88	0.00
50	BANK UOB BUANA TBK	16	5	4	0.20	1	16.64	3.25
51	BANK EKSPOR INDONESIA	6	3	26	1.00	1	15.99	0.59

**Model I : Pengaruh karakteristik dewan komisaris, pemilihan auditor eksternal, besarnya aset, dan tingka NPL net terhadap ROE**

Estimation Command:

=====  
LS ROE C JBOC MBOC IBOC BIG4 LNASET NPLN

Estimation Equation:

=====  
ROE = C(1) + C(2)\*JBOC + C(3)\*MBOC + C(4)\*IBOC + C(5)\*BIG4 + C(6)\*LNASET + C(7)\*NPLN

Substituted Coefficients:

=====  
ROE = -23.44941628 - 0.5837571122\*JBOC - 0.001498079019\*MBOC - 7.623169129\*IBOC + 1.515679234\*BIG4 + 2.796264671\*LNASET - 1.295977287\*NPLN

Dependent Variable: ROE

Method: Least Squares

Date: 12/06/08 Time: 13:42

Sample: 1 51

Included observations: 51

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-23.44942	16.30828	-1.437884	0.1575
JBOC	-0.583757	0.597009	-0.977803	0.3335
MBOC	-0.001498	0.080697	-0.018564	0.9853
IBOC	-7.623169	4.863513	-1.567420	0.1242
BIG4	1.515679	2.809561	0.539472	0.5923
LNASET	2.796265	1.147652	2.436509	0.0189
NPLN	-1.295977	0.435636	-2.974909	0.0047
R-squared	0.427036	Mean dependent var	14.76471	
Adjusted R-squared	0.348905	S.D. dependent var	8.714558	
S.E. of regression	7.031818	Akaike info criterion	6.865642	
Sum squared resid	2175.645	Schwarz criterion	7.130794	
Log likelihood	-168.0739	F-statistic	5.465614	
Durbin-Watson stat	2.602056	Prob(F-statistic)	0.000270	

Lampiran 2 (Lanjutan)  
Output E-Views Model I

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	1.188068	Probability	0.337214
Obs*R-squared	28.70077	Probability	0.324864

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/08/08 Time: 11:30

Sample: 1 51

Included observations: 51

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1829.854	2203.306	0.830504	0.4144
JBOC	-34.88833	201.3642	-0.173260	0.8639
JBOC^2	-2.190672	3.295608	-0.664523	0.5127
JBOC*MBOC	-0.174864	0.679419	-0.257373	0.7991
JBOC*IBOC	-42.73421	49.98338	-0.854968	0.4010
JBOC*BIG4	-9.204892	19.57806	-0.470164	0.6425
JBOC*LNASET	4.867056	14.30868	0.340147	0.7367
JBOC*NPLN	2.829584	4.659696	0.607246	0.5494
MBOC	-6.663714	19.77360	-0.337001	0.7390
MBOC^2	-0.044665	0.065803	-0.678774	0.5038
MBOC*IBOC	2.712891	5.657667	0.479507	0.6359
MBOC*BIG4	-2.605089	4.387423	-0.593763	0.5582
MBOC*LNASET	0.617296	1.541808	0.400371	0.6924
MBOC*NPLN	0.366928	0.654492	0.560630	0.5802
IBOC	-262.6701	1155.186	-0.227383	0.8221
IBOC^2	-13.15635	169.7046	-0.077525	0.9388
IBOC*BIG4	-160.3311	161.4905	-0.992820	0.3307
IBOC*LNASET	25.26863	90.09535	0.280465	0.7815
IBOC*NPLN	24.36700	34.52226	0.705835	0.4871
BIG4	1167.076	615.6489	1.895684	0.0701
BIG4*LNASET	-60.83449	39.30123	-1.547903	0.1347
BIG4*NPLN	-17.09349	17.17038	-0.995522	0.3294
LNASET	-221.1759	311.5759	-0.709862	0.4846
LNASET^2	6.322061	11.73347	0.538806	0.5950
LNASET*NPLN	1.602728	4.922543	0.325589	0.7476
NPLN	-65.36644	71.64156	-0.912409	0.3706
NPLN^2	1.677842	1.143938	1.466725	0.1554
R-squared	0.562760	Mean dependent var	42.65970	
Adjusted R-squared	0.089084	S.D. dependent var	49.53443	
S.E. of regression	47.27662	Akaike info criterion	10.85496	
Sum squared resid	53641.88	Schwarz criterion	11.67769	
Log likelihood	-249.8015	F-statistic	1.188068	
Durbin-Watson stat	1.892461	Prob(F-statistic)	0.337214	

**Model II : Pengaruh karakteristik dewan komisaris, pemilihan auditor eksternal, dan besarnya aset, terhadap NPL**

Estimation Command:

LS NPLN C JBOC MBOC IBOC BIG4 LNASET

Estimation Equation:

$NPLN = C(1) + C(2)*JBOC + C(3)*MBOC + C(4)*IBOC + C(5)*BIG4 + C(6)*LNASET$

Substituted Coefficients:

$NPLN = 0.1131058513 + 0.01487926946*JBOC - 0.04326989368*MBOC + 1.153995895*IBOC + 0.0469045149*BIG4 + 0.1196877715*LNASET$

Dependent Variable: NPLN  
Method: Least Squares  
Date: 12/07/08 Time: 13:42  
Sample: 1 51  
Included observations: 51

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.113106	5.580541	0.020268	0.9839
JBOC	0.014879	0.204280	0.072838	0.9423
MBOC	-0.043270	0.026850	-1.611539	0.1141
IBOC	1.153996	1.655341	0.697135	0.4893
BIG4	0.046905	0.961384	0.048789	0.9613
LNASET	0.119688	0.392312	0.305083	0.7617
R-squared	0.067334	Mean dependent var	2.136458	
Adjusted R-squared	-0.036296	S.D. dependent var	2.363719	
S.E. of regression	2.406233	Akaike info criterion	4.704133	
Sum squared resid	260.5480	Schwarz criterion	4.931406	
Log likelihood	-113.9554	F-statistic	0.649756	
Durbin-Watson stat	2.365469	Prob(F-statistic)	0.653115	

Lampiran 3 (Lanjutan)  
Output E-Views Model II

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.594210	Probability	0.882155
Obs*R-squared	13.61527	Probability	0.805639

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/08/08 Time: 11:30

Sample: 1 51

Included observations: 51

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	582.9386	748.6432	0.778660	0.4421
JBOC	-17.45878	71.98843	-0.242522	0.8100
JBOC^2	0.059773	1.156191	0.051698	0.9591
JBOC*MBOC	0.042117	0.242672	0.173556	0.8633
JBOC*IBOC	10.39101	15.43041	0.673411	0.5057
JBOC*BIG4	-2.788544	6.174466	-0.451625	0.6547
JBOC*LNASET	0.816721	5.142388	0.158821	0.8748
MBOC	2.687273	6.754139	0.397871	0.6935
MBOC^2	0.015479	0.019544	0.792018	0.4344
MBOC*IBOC	0.111870	1.730213	0.064657	0.9489
MBOC*BIG4	0.965876	1.469766	0.657163	0.5159
MBOC*LNASET	-0.269564	0.514596	-0.523836	0.6041
IBOC	212.9071	373.8983	0.569425	0.5732
IBOC^2	-5.503532	58.19773	-0.094566	0.9253
IBOC*BIG4	-18.39728	49.29367	-0.373218	0.7115
IBOC*LNASET	-14.05430	28.66707	-0.490260	0.6274
BIG4	-16.32905	209.6503	-0.077887	0.9384
BIG4*LNASET	2.138257	13.37949	0.159816	0.8741
LNASET	-70.96309	104.3338	-0.680155	0.5015
LNASET^2	2.204822	3.917533	0.562809	0.5776
R-squared	0.266966	Mean dependent var	5.108785	
Adjusted R-squared	-0.182313	S.D. dependent var	16.07949	
S.E. of regression	17.48391	Akaike info criterion	8.846914	
Sum squared resid	9476.298	Schwarz criterion	9.604493	
Log likelihood	-205.5963	F-statistic	0.594210	
Durbin-Watson stat	1.895907	Prob(F-statistic)	0.882155	

Lampiran 4  
Output SPSS Model I

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
ROE	14.7647	8.71456	51
JBOC	5.2157	2.15698	51
MBOC	15.8824	16.34093	51
IBOC	.5133	.21576	51
BIG4	.69	.469	51
LnASET	16.7810	1.55797	51
NPLN	2.1365	2.36351	51

**Correlations**

	ROE	JBOC	MBOC	IBOC	BIG4	LnASET	NPLN
Pearson Correlation	ROE	1.000	.199	.323	-.196	.378	.498
	JBOC	.199	1.000	.092	-.188	.365	.568
	MBOC	.323	.092	1.000	.204	.290	.546
	IBOC	-.196	-.188	.204	1.000	-.084	-.022
	BIG4	.378	.365	.290	-.084	1.000	.648
	LnASET	.498	.568	.546	-.022	.648	1.000
	NPLN	-.399	.015	-.231	.041	-.030	-.072
Sig. (1-tailed)	ROE		.081	.010	.084	.003	.000
	JBOC	.081		.260	.094	.004	.000
	MBOC	.010	.260		.075	.019	.000
	IBOC	.084	.094	.075		.278	.439
	BIG4	.003	.004	.019	.278		.000
	LnASET	.000	.000	.000	.439	.000	
	NPLN	.002	.459	.052	.387	.416	.308
N	ROE	51	51	51	51	51	51
	JBOC	51	51	51	51	51	51
	MBOC	51	51	51	51	51	51
	IBOC	51	51	51	51	51	51
	BIG4	51	51	51	51	51	51
	LnASET	51	51	51	51	51	51
	NPLN	51	51	51	51	51	51

Lampiran 4 (Lanjutan)

Output SPSS Model I

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	NPLN, JBOC, IBOC, MBOC, BIG4, LnASET*	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ROE

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.854 <sup>a</sup>	.428	.350	7.02730	.428	5.482	6	44	.000	2.602

a. Predictors: (Constant), NPLN, JBOC, IBOC, MBOC, BIG4, LnASET

b. Dependent Variable: ROE

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1624.329	6	270.722	5.482	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2172.847	44	49.383		
	Total	3797.176	50			

a. Predictors: (Constant), NPLN, JBOC, IBOC, MBOC, BIG4, LnASET

b. Dependent Variable: ROE

Lampiran 4 (Lanjutan)

Output SPSS Model 1

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-23.406	15.296		-1.436	.158	-58.249	9.437					
	JBOC	-.587	.587	-.145	-.904	.330	-1.790	.615	.189	-.147	-.112	.596	1.677
	MBOC	-.001	.001	-.002	-.015	.988	-.164	.161	.323	-.002	-.002	.568	1.759
	IBOC	-7.679	4.860	-.190	-1.580	.121	-17.473	2.116	-.196	-.232	-.189	.898	1.113
	BIG4	1.515	2.807	.081	.540	.592	-4.142	7.173	.378	.081	.067	.571	1.752
	LnASET	2.796	1.146	.500	2.439	.019	.465	5.106	.498	.345	.279	.310	3.230
	NPLN	-1.295	.436	-.351	-2.973	.005	-2.173	-.417	-.389	-.409	-.339	.821	1.073

a. Dependent Variable: ROE

Coefficient Correlations<sup>a</sup>

Model		NPLN	JBOC	IBOC	MBOC	BIG4	LnASET
1	Correlations	NPLN	1.000	-.011	-.106	.235	-.007
		JBOC	-.011	1.000	.147	.268	-.538
		IBOC	-.106	.147	1.000	-.216	.000
		MBOC	.235	.268	-.216	1.000	-.545
		BIG4	-.007	.048	.076	.084	1.000
		LnASET	-.048	-.538	.000	-.545	1.000
	Covariances	NPLN	.190	-.003	-.224	.008	-.008
		JBOC	-.003	.356	.426	.013	-.368
		IBOC	-.224	.426	23.618	-.085	1.035
		MBOC	.008	.013	-.085	.007	.019
		BIG4	-.008	.081	1.035	.019	7.880
		LnASET	-.023	-.368	-.004	-.050	-1.705

a. Dependent Variable: ROE

Lampiran 4 (Lanjutan)

Output SPSS Model 1

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Mode	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions						
				(Constant)	JBOC	MBOC	IBOC	BIG4	LnASET	NPLN
1	1	5.581	1.000	.00	.00	.01	.00	.00	.00	.01
	2	.665	2.896	.00	.00	.16	.00	.01	.00	.47
	3	.307	4.262	.00	.04	.44	.01	.09	.00	.33
	4	.261	4.627	.00	.00	.04	.17	.30	.00	.18
	5	.130	6.550	.00	.28	.06	.29	.33	.00	.00
	6	.055	10.102	.02	.44	.00	.53	.00	.01	.00
	7	.002	60.467	.98	.24	.29	.00	.26	.99	.00

a. Dependent Variable: ROE

Casewise Diagnostics<sup>a</sup>

Case Number	Std. Residual	ROE	Predicted Value	Residual
27	2.168	36.00	20.7657	1.5234E1

a. Dependent Variable: ROE

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-8.0942	23.9096	14.7647	5.89970	51
Residual	-10.68594	15.23427	.00000	6.59219	51
Std. Predicted Value	-4.011	1.604	.000	1.000	51
Std. Residual	-1.518	2.168	.000	.936	51

a. Dependent Variable: ROE

Lampiran 5  
Output SPSS Model II

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
NPLN	2.1366	2.36351	51
JBOC	5.2157	2.15698	51
MBOC	15.8824	16.34093	51
IBOC	.5133	.21576	51
BIG4	.69	.489	51
LnASET	16.7810	1.55797	51

Correlations

		NPLN	JBOC	MBOC	IBOC	BIG4	LnASET
Pearson Correlation	NPLN	1.000	.015	-.231	.041	-.030	-.072
	JBOC	.015	1.000	.092	-.188	.365	.568
	MBOC	-.231	.092	1.000	.204	.290	.545
	IBOC	.041	-.188	.204	1.000	-.084	-.022
	BIG4	-.030	.365	.290	-.084	1.000	.648
	LnASET	-.072	.568	.545	-.022	.648	1.000
	Sig. (1-tailed)	NPLN		.458	.052	.387	.416
	JBOC	.458		.260	.094	.004	.000
	MBOC	.052	.260		.075	.019	.000
	IBOC	.387	.094	.075		.278	.439
	BIG4	.416	.004	.019	.278		.000
	LnASET	.308	.000	.000	.439	.000	
N	NPLN	51	51	51	51	51	51
	JBOC	51	51	51	51	51	51
	MBOC	51	51	51	51	51	51
	IBOC	51	51	51	51	51	51
	BIG4	51	51	51	51	51	51
	LnASET	51	51	51	51	51	51

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LnASET IBOC, MBOC, JBOC, BIG4 <sup>b</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: NPLN

Lampiran 5 (Lanjutan)

Output SPSS Model II

Model Summary<sup>a</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.261 <sup>a</sup>	.068	-.026	2.40634	.068	.655	5	45	.658	2.367

a. Predictors: (Constant), LnASET, IBOC, MBOC, JBOC, BIG4

b. Dependent Variable: NPLN

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.965	5	3.791	.655	.658 <sup>a</sup>
	Residual	260.354	45	5.786		
	Total	279.309	50			

a. Predictors: (Constant), LnASET, IBOC, MBOC, JBOC, BIG4

b. Dependent Variable: NPLN

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Fair	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	.663	5.678		.071	.992	-11.175	11.284						
	JBOC	.615	.204	.614	.070	.942	-.086	.429	.015	.011	.013	.596	1.577	
	MBOC	-.643	.027	-.310	-1.619	.112	-.080	.611	-.231	-.235	-.233	.602	1.662	
	IBOC	1.178	1.654	.180	.713	.490	-2.152	4.571	.041	.106	.103	.938	1.101	
	BIG4	.044	.951	.068	.046	.964	-1.091	1.979	-.030	.007	.007	.571	1.752	
	LnASET	1.22	.362	.881	.312	.256	-.667	.812	-.077	.005	.045	.318	3.723	

a. Dependent Variable: NPLN

Lampiran 5 (Lanjutan)

Output SPSS Model II

Coefficient Correlations<sup>a</sup>

Model		LnASET	IBOC	MBOC	JBOC	BIG4	
1	Correlations	LnASET	1.000	-.006	-.550	-.540	-.531
		IBOC	-.006	1.000	-.198	.147	.076
		MBOC	-.550	-.198	1.000	.278	.088
		JBOC	-.540	.147	.278	1.000	.048
		BIG4	-.531	.076	.088	.048	1.000
	Covariances	LnASET	.154	-.004	-.006	-.043	-.200
		IBOC	-.004	2.736	-.009	.049	.120
		MBOC	-.006	-.009	.001	.002	.002
		JBOC	-.043	.049	.002	.042	.009
		BIG4	-.200	.120	.002	.009	.923

a. Dependent Variable: NPLN

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dinse nsion	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	JBOC	MBOC	IBOC	BIG4	LnASET
1	1	5125	1.000	.00	.00	.01	.00	.01	.00
	2	.416	3.516	.00	.01	.62	.01	.00	.00
	3	.273	4.331	.00	.01	.01	.16	.39	.00
	4	.139	6.270	.00	.28	.06	.28	.34	.00
	5	.065	9.663	.02	.45	.00	.55	.00	.01
	6	.002	57.026	.98	.24	.30	.00	.26	.99

a. Dependent Variable: NPLN

Casewise Diagnostics<sup>a</sup>

Case Nu...	Std. Residual	NPLN	Predicted Value	Residual
11	4.452	13.33	2.6222	1.0707E1

a. Dependent Variable: NPLN

Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	.0111	2.9097	2.1365	.61571	51
Residual	-2.52062	10.70778	.00000	2.28190	51
Std. Predicted Value	-3.452	1.256	.000	1.000	51
Std. Residual	-1.048	4.452	.000	.949	51

a. Dependent Variable: NPLN